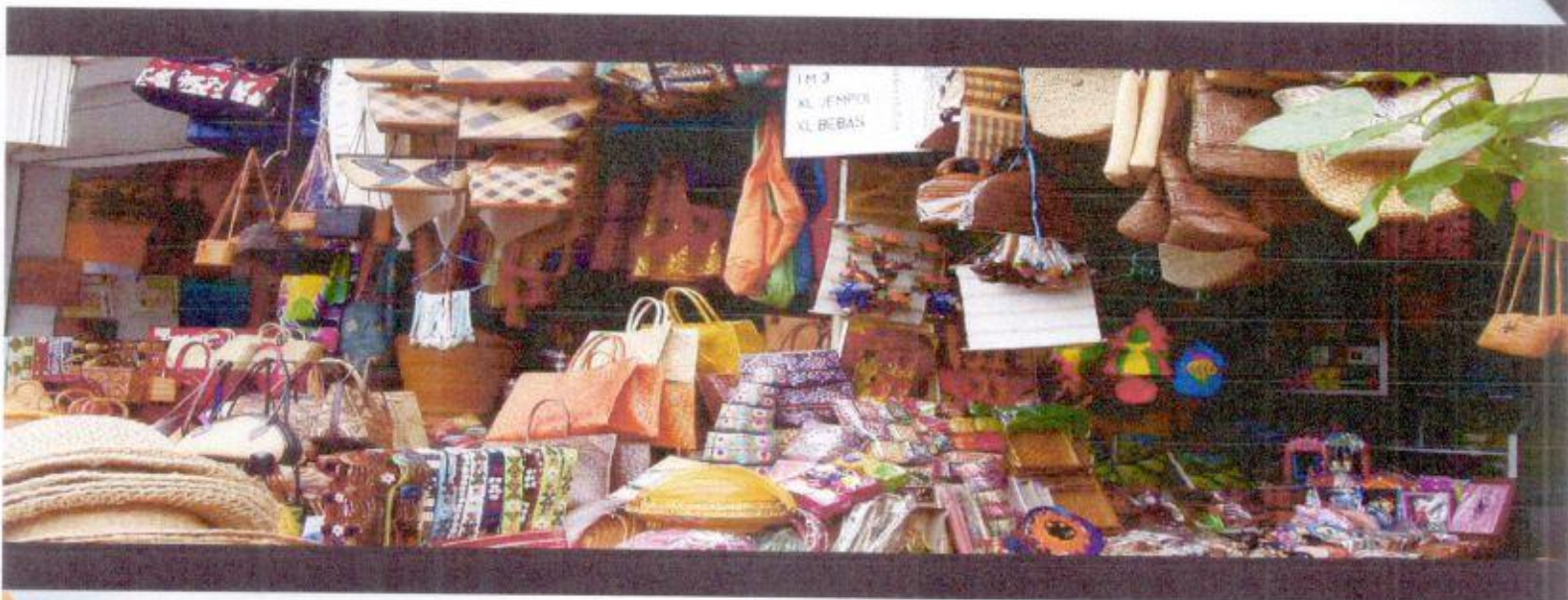




**PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN KEUANGAN AUDITED**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**


KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah di Audit Badan Pemeriksa Keuangan..

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Denpasar, 15 Mei 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Bali



Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701211 199803 1 005



ပိမိၵ်ႈႁူၵ်းပူၼ်ႈတႆး

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိၵ်ႈသိၵ်ႈႁူၵ်းပူၼ်ႈတႆး

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

တႆးသိၵ်ႈသိၵ်ႈႁူၵ်းပူၼ်ႈတႆး (100000000) ၵူၼ်းပူၼ်ႈတႆး (100000000) ၵူၼ်းပူၼ်ႈတႆး
Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091
Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-ef : diskopukm@baliprov.go.id

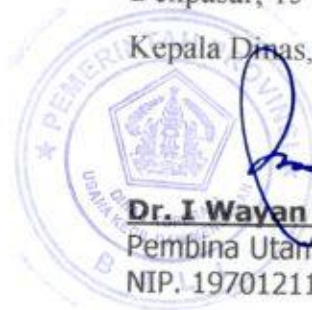
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Denpasar, 15 Mei 2024

Kepala Dinas,



Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701211 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp 19.378.257.240,00- atau mencapai 89,95% dari anggarannya.

Realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.622.458.455,00,- atau 92,18% dari anggarannya.

Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2023 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 11.323.345.059,00- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 2.253.800,00- atau mencapai 0,02% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp. 11.321.091.259,00- atau mencapai 99,98% dari seluruh aset. Sedangkan aset lain-lain jumlahnya Rp.00,00 atau mencapai 00,00% dari seluruh aset dan Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.806.560.552,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2023.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp 0,00.-

Realisasi Beban Tahun 2023 sebesar Rp 19.637.034.051,00

Realisasi Defisit Operasional Tahun 2023 sebesar Rp (19.637.034.051,00)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
2.1. Ekonomi Makro	
2.2. Kebijakan Keuangan	
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....	19
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	
Bab IV Kebijakan akuntansi	23
4.1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada OPD	
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan OPD.....	60
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
2. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2023
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pengeluaran Bulan Desember 2023
4. Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2023 Urusan Akuntansi dengan Pengurus Barang.
5. Rekening Koran, STS dan Penutupan Kas Bendahara bulan Desember 2023
6. Bukti Pembayaran Listrik, Telpon dan Air Bulan Desember 2023
7. Surat Keputusan Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2023
8. Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Tahun 2023
9. Berita Acara Koreksi Pencatatan Gedung Tahun 2023



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023
AUDITED

kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	= (4 / 3) * 10	6
5	BELANJA DAERAH	21.543.645.124	19.378.257.240,00	89,95	22.321.546.376,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.486.705.124	19.329.757.240,00	89,96	22.321.546.376,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.142.384.786	11.632.298.785,00	88,51	12.277.888.178,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.573.849.667	4.847.922.364,00	86,98	5.319.273.864,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.982.384.823	3.495.982.524,00	87,79	3.825.146.950,00
5.1.01.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.982.384.823	3.495.982.524,00	87,79	3.825.146.950,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	367.362.114	327.173.374,00	89,06	355.385.998,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	367.362.114	327.173.374,00	89,06	355.385.998,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218.610.000	195.180.000,00	89,28	181.440.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218.610.000	195.180.000,00	89,28	181.440.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	227.065.000	173.914.000,00	76,59	242.396.350,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	227.065.000	173.914.000,00	76,59	242.396.350,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	113.095.000	96.070.000,00	84,95	108.670.000,00
5.1.01.01.01.09	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	113.095.000	96.070.000,00	84,95	108.670.000,00
5.1.01.01.01.10	Belanja Tunjangan Beras ASN	211.347.630	179.022.240,00	84,71	196.475.460,00
5.1.01.01.01.11	Belanja Tunjangan Beras PNS	211.347.630	179.022.240,00	84,71	196.475.460,00
5.1.01.01.01.12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.338.356	30.060.089,00	74,52	32.903.495,00
5.1.01.01.01.13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.338.356	30.060.089,00	74,52	32.903.495,00
5.1.01.01.01.14	Belanja Pembulatan Gaji ASN	81.697	41.015,00	50,20	47.797,00
5.1.01.01.01.15	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.697	41.015,00	50,20	47.797,00
5.1.01.01.01.16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	368.482.906	321.956.076,00	87,37	345.458.429,00
5.1.01.01.01.17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	368.482.906	321.956.076,00	87,37	345.458.429,00
5.1.01.01.01.18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.101.249	7.130.713,00	88,02	7.837.349,00
5.1.01.01.01.19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.101.249	7.130.713,00	88,02	7.837.349,00
5.1.01.01.01.20	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.340.517	21.392.333,00	87,89	23.512.036,00
5.1.01.01.01.21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.340.517	21.392.333,00	87,89	23.512.036,00
5.1.01.01.01.22	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.640.375	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.23	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.640.375	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.481.320.119	6.744.301.421,00	90,15	6.881.464.314,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.659.757.540	4.146.437.795,00	88,98	2.752.585.731,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.659.757.540	4.146.437.795,00	88,98	2.752.585.731,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	663.211.695	639.294.012,00	96,39	0,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	663.211.695	639.294.012,00	96,39	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.158.350.884	1.958.569.614,00	90,74	4.128.878.583,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.158.350.884	1.958.569.614,00	90,74	4.128.878.583,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.215.000	40.075.000,00	45,95	77.150.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium	87.215.000	40.075.000,00	45,95	77.150.000,00
5.1.01.03.02	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	87.215.000	40.075.000,00	45,95	77.150.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.269.320.338	7.622.458.455,00	92,18	9.868.658.198,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.009.702.668	946.035.281,00	93,69	3.071.077.979,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.009.702.668	946.035.281,00	93,69	3.071.077.979,00
5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	286.729.600	286.683.500,00	99,98	223.527.500,00
5.1.02.01.01.02	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	15.832.500,00
5.1.02.01.01.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	79.212.950	60.854.031,00	76,82	216.232.628,00
5.1.02.01.01.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.159.000	31.433.300,00	92,02	46.886.628,00
5.1.02.01.01.05	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0,00	0,00	6.680.000,00
5.1.02.01.01.06	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.850.000	5.560.000,00	95,04	5.860.000,00
5.1.02.01.01.07	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55.033.800	49.080.750,00	89,18	82.372.004,00
5.1.02.01.01.08	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.586.500	21.091.600,00	97,71	25.078.101,00

5.1.02.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.610.500	15.481.000,00	99,17	12.452.333,00
5.1.02.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.727.450	3.698.100,00	99,21	80.190.244,00
5.1.02.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera	1.800.000	0,00	0,00	1.100.000,00
5.1.02.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	350.382.868	343.189.000,00	97,95	430.467.321,00
5.1.02.01.0	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	0	0,00	0,00	1.484.023.720,00
5.1.02.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.855.000	54.970.750,00	72,47	47.258.000,00
5.1.02.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000	516.250,00	34,42	0,00
5.1.02.01.0	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urus	74.880.000	73.477.000,00	98,13	371.700.000,00
5.1.02.01.0	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.375.000	0,00	0,00	21.417.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.490.325.874	5.288.582.777,00	96,33	5.453.203.087,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Kantor	5.228.390.450	5.092.002.643,00	97,39	4.965.120.578,00
5.1.02.02.0	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemb	720.400.000	669.400.000,00	92,92	1.661.450.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.957.483.600	2.938.042.100,00	99,34	1.917.683.600,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.498.000	206.498.000,00	100,00	173.498.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.500.000	12.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208.197.600	208.197.600,00	100,00	208.197.600,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.296.400	312.296.400,00	100,00	312.296.400,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Tenaga Supir	277.596.800	277.596.800,00	100,00	310.596.800,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000	3.000.000,00	45,45	6.900.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	169.344.850	169.000.000,00	99,80	109.160.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	82.500.000	79.650.000,00	96,55	52.199.999,00
5.1.02.02.0	Belanja Tagihan Telepon	20.000.000	13.536.779,00	67,68	14.973.789,00
5.1.02.02.0	Belanja Tagihan Air	32.500.000	27.137.500,00	83,50	22.479.900,00
5.1.02.02.0	Belanja Tagihan Listrik	209.000.000	165.376.264,00	79,13	159.866.290,00
5.1.02.02.0	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0	0,00	0,00	6.402.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.473.200	9.771.200,00	72,52	9.416.200,00
5.1.02.02.0	Belanja luran Jaminan/Asuransi	197.774.424	196.580.134,00	99,40	191.602.512,00
5.1.02.02.0	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	99.182.808	98.583.878,00	99,40	93.010.896,00
5.1.02.02.0	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.580.720	5.547.020,00	99,40	5.580.720,00
5.1.02.02.0	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	93.010.896	92.449.236,00	99,40	93.010.896,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64.161.000	0,00	0,00	259.730.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	33.000.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	63.441.000	0,00	0,00	50.400.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	720.000	0,00	0,00	42.060.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	84.320.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Personal Computer	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	0	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0,00	0,00	18.749.997,00
5.1.02.02.0	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0	0,00	0,00	18.749.997,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	289.650.000	88.172.000,00	30,44	248.716.511,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	289.650.000	88.172.000,00	30,44	248.716.511,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Be	196.800.000	61.192.000,00	31,09	171.726.549,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Be	40.000.000	15.830.000,00	39,58	20.224.995,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Be	0	0,00	0,00	7.175.967,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Ru	25.710.000	3.610.000,00	14,04	25.080.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Co	16.790.000	5.150.000,00	30,67	14.682.000,00
5.1.02.03.0	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralat	10.350.000	2.390.000,00	23,09	9.827.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.460.141.796	1.299.668.397,00	89,01	1.040.985.621,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.460.141.796	1.299.668.397,00	89,01	1.040.985.621,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	166.872.000	24.691.597,00	14,80	22.345.621,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.880.000	115.880.000,00	100,00	70.490.000,00
5.1.02.04.0	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.177.389.796	1.159.096.800,00	98,45	948.150.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ke	19.500.000	0,00	0,00	54.675.000,00
5.1.02.05.0	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/	19.500.000	0,00	0,00	54.675.000,00
5.1.02.05.0	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.500.000	0,00	0,00	54.675.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.0	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.04.04.0	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyar	50.000.000	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.05.05.0	Belanja Hibah kepada Koperasi	50.000.000	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00

5.1.05.05.04	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	50.000.000	50.000.000,00	100,00	150.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.486.705.124	19.329.757.240,00	89,96	22.321.546.376,00
5.2	BELANJA MODAL	56.940.000	48.500.000,00	85,18	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.940.000	48.500.000,00	85,18	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.070.000	11.600.000,00	96,11	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.070.000	11.600.000,00	96,11	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Pendingin	12.070.000	11.600.000,00	96,11	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	44.870.000	36.900.000,00	82,24	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.500.000	30.000.000,00	80,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Personal Computer	37.500.000	30.000.000,00	80,00	0,00
5.2.02.10.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.370.000	6.900.000,00	93,62	0,00
5.2.02.10.04	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.370.000	6.900.000,00	93,62	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	56.940.000	48.500.000,00	85,18	0,00
	JUMLAH BELANJA	21.543.645.124	19.378.257.240,00	89,95	22.321.546.376,00
	SURPLUS/DEFISIT	21.543.645.124	(19.378.257.240,00)	89,95	(2.321.546.376,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	21.543.645.124	(19.378.257.240,00)	89,95	(2.321.546.376,00)

Provinsi Bali, 15 Mei 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Dr. I Wayan Eradisa, S.E., M.Si.
NIP. 197012111998031005

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Neraca Audited
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

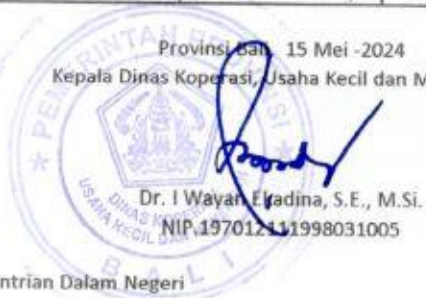
Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	11.323.345.059,00	11.515.935.128,00
1.1	ASET LANCAR	2.253.800,00	11.395.980,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(19.378.257.240,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(19.378.257.240,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(19.378.257.240,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(19.378.257.240,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	2.253.800,00	11.395.980,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.253.800,00	11.395.980,00
1.1.12.01.01	Bahan	704.000,00	11.075.000,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	704.000,00	11.075.000,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.549.800,00	320.980,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	20.240,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	139.800,00	300.740,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	60.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	1.350.000,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	19.378.257.240,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	19.378.257.240,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	19.378.257.240,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.378.257.240,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.253.800,00	11.395.980,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	11.321.091.259,00	11.502.635.148,00
1.3.01	Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01	Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.311.961.475,00	5.262.901.475,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.976.339.000,00	1.976.339.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.976.339.000,00	1.976.339.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.099.020.000,00	1.099.020.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	703.450.000,00	703.450.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	173.869.000,00	173.869.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	3.100.000,00	3.100.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.377.587.175,00	2.365.427.175,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	450.046.000,00	449.486.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	7.250.000,00	7.250.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	338.041.000,00	337.481.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	104.755.000,00	104.755.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.769.479.300,00	1.757.879.300,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	779.083.750,00	779.083.750,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	42.170.000,00	42.170.000,00

1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	431.470.000,00	419.870.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1.380.000,00	1.380.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	498.885.550,00	498.885.550,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	16.490.000,00	16.490.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	158.061.875,00	158.061.875,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	34.715.750,00	34.715.750,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	30.209.225,00	30.209.225,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	30.292.900,00	30.292.900,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	62.844.000,00	62.844.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	239.283.000,00	239.283.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	153.148.000,00	153.148.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	41.118.000,00	41.118.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	112.030.000,00	112.030.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	86.135.000,00	86.135.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	78.160.000,00	78.160.000,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	7.975.000,00	7.975.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	11.902.000,00	11.902.000,00
1.3.02.10	Komputer	703.750.300,00	666.850.300,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	614.643.800,00	584.643.800,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	614.643.800,00	584.643.800,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	89.106.500,00	82.206.500,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	82.206.500,00	82.206.500,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	0,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.697.575.714,00	8.611.483.560,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.697.575.714,00	8.611.483.560,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.639.015.714,00	8.552.923.560,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6.612.133.300,00	6.612.133.300,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.031.250.000,00	1.031.250.000,00
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	949.040.260,00	909.540.260,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154,00	0,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.560.000,00	58.560.000,00
1.3.03.01.02.0005	Asrama	58.560.000,00	58.560.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.181.650,00	149.181.650,00
1.3.04.02	Bangunan Air	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00
1.3.04.03	Instalasi	146.245.000,00	146.245.000,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	121.715.000,00	121.715.000,00
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	24.530.000,00	24.530.000,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	24.530.000,00	24.530.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	11.573.000,00	11.573.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	11.573.000,00	11.573.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	10.973.000,00	10.973.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	9.393.000,00	9.393.000,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	1.580.000,00	1.580.000,00
1.3.05.01.05	Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.168.660,00	179.168.660,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	179.168.660,00	179.168.660,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	179.168.660,00	179.168.660,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	179.168.660,00	179.168.660,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.582.184.240,00)	(7.265.488.197,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.191.699.419,00)	(5.062.011.467,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.969.144.357,00)	(1.905.776.082,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendar	(1.099.020.000,00)	(1.089.496.190,00)

1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendar	(696.255.357,00)	(645.548.214,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendar	(173.869.000,00)	(170.731.678,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)
1.3.07.01.03.0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.333.202.357,00)	(2.305.034.491,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(7.250.000,00)	(7.250.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlempa	(338.041.000,00)	(337.481.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(92.694.167,00)	(86.354.167,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(761.575.000,00)	(747.048.000,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(42.170.000,00)	(42.170.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(418.171.665,00)	(412.730.999,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.380.000,00)	(1.380.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangg	(497.368.650,00)	(496.068.450,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Ke	(16.490.000,00)	(16.490.000,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-M	(34.715.750,00)	(34.715.750,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Ku	(30.209.225,00)	(30.209.225,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Ku	(30.292.900,00)	(30.292.900,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Le	(62.844.000,00)	(62.844.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	(238.923.000,00)	(237.895.000,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(40.758.000,00)	(39.730.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan	(112.030.000,00)	(112.030.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Teleg	(78.160.000,00)	(78.160.000,00)
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosia	(7.975.000,00)	(7.975.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laborator	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(635.427.705,00)	(598.303.894,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(556.795.360,00)	(523.970.984,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Person	(78.632.345,00)	(74.332.910,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.355.667.393,00)	(2.172.593.259,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Gedung	(2.355.667.393,00)	(2.172.593.259,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(1.511.854.090,00)	(1.377.307.932,00)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(371.888.493,00)	(351.229.647,00)
1.3.07.02.01.0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedu	(447.704.327,00)	(421.705.280,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(698.883,00)	0,00
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asr	(23.521.600,00)	(22.350.400,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(34.817.428,00)	(30.883.471,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(666.863,00)	(593.447,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Banguna	(666.863,00)	(593.447,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(34.150.565,00)	(30.290.024,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat P	(26.655.292,00)	(23.612.417,00)
1.3.07.03.03.0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahan	(7.495.273,00)	(6.677.607,00)
	JUMLAH ASET TETAP	11.321.091.259,00	11.502.635.148,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	1.904.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	143.030.375,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	0,00	143.030.375,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	0,00	143.030.375,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	0,00	143.030.375,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(141.126.375,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(141.126.375,00)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	(141.126.375,00)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	(141.126.375,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	1.904.000,00
	JUMLAH ASET	11.323.345.059,00	11.515.935.128,00

		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	516.784.507,00	528.400.086,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	516.784.507,00	528.400.086,00
2.1.06	Utang Belanja	516.784.507,00	528.400.086,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	500.266.098,00	509.034.549,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.595.041,00	15.143.561,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	571.914,00
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga P	0,00	68.652,00
2.1.06.01.01.0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	30.138,00
2.1.06.01.01.0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tu	0,00	30.399,00
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Ke	13.595.041,00	14.436.968,00
2.1.06.01.01.0019	Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-luran Jam	0,00	1.371,00
2.1.06.01.01.0021	Utang Belanja luran Jaminan Kematian ASN-luran Jaminan Ke	0,00	4.119,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	486.671.057,00	493.890.988,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ker	305.722.388,00	197.556.395,00
2.1.06.01.02.0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Ke	51.363.878,00	0,00
2.1.06.01.02.0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Ke	129.584.791,00	296.334.593,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	16.518.409,00	19.365.537,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	16.518.409,00	19.365.537,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.122.610,00	1.132.813,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	2.013.750,00	3.166.800,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.382.049,00	15.065.924,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	516.784.507,00	528.400.086,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	516.784.507,00	528.400.086,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	10.806.560.552,00	10.987.535.042,00
3.1	EKUITAS	10.806.560.552,00	10.987.535.042,00
3.1.01	Ekuitas	(8.602.906.855,00)	(11.334.011.334,00)
3.1.01.01	Ekuitas	11.034.127.196,00	11.383.959.861,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	11.034.127.196,00	11.383.959.861,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	11.034.127.196,00	11.383.959.861,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(19.637.034.051,00)	(22.717.971.195,00)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(19.637.034.051,00)	(22.717.971.195,00)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(19.637.034.051,00)	(22.717.971.195,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	19.409.467.407,00	22.321.546.376,00
3.1.03.01	RK PPKD	19.409.467.407,00	22.321.546.376,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	19.409.467.407,00	22.321.546.376,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	19.409.467.407,00	22.321.546.376,00
	JUMLAH EKUITAS	10.806.560.552,00	10.987.535.042,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.323.345.059,00	11.515.935.128,00

Provinsi Bali, 15 Mei -2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Dr. I Wayan Eradina, S.E., M.Si.
NIP.19701211998031005

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI BALI



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023
AUDITED

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	19.637.034.051,00	22.728.628.294,00	(3.091.594.243,00)	(13,60)
8.1	BEBAN OPERASI	19.327.283.841,00	22.306.271.344,00	(2.978.987.503,00)	(13,35)
8.1.01	Beban Pegawai	11.623.530.334,00	12.230.418.508,00	(606.888.174,00)	(4,96)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.846.373.844,00	5.314.641.582,00	(468.267.738,00)	(8,81)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	3.495.410.610,00	3.822.107.852,00	(326.697.242,00)	(8,55)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	3.495.410.610,00	3.822.107.852,00	(326.697.242,00)	(8,55)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	327.104.722,00	355.196.710,00	(28.091.988,00)	(7,91)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	327.104.722,00	355.196.710,00	(28.091.988,00)	(7,91)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	195.180.000,00	181.440.000,00	13.740.000,00	7,57
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	195.180.000,00	181.440.000,00	13.740.000,00	7,57
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	173.914.000,00	242.396.350,00	(68.482.350,00)	(28,25)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	173.914.000,00	242.396.350,00	(68.482.350,00)	(28,25)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	96.070.000,00	108.670.000,00	(12.600.000,00)	(11,59)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	96.070.000,00	108.670.000,00	(12.600.000,00)	(11,59)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	178.992.102,00	196.505.598,00	(17.513.496,00)	(8,91)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	178.992.102,00	196.505.598,00	(17.513.496,00)	(8,91)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.029.690,00	32.933.894,00	(2.904.204,00)	(8,82)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.029.690,00	32.933.894,00	(2.904.204,00)	(8,82)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	41.015,00	47.632,00	(6.617,00)	(13,89)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	41.015,00	47.632,00	(6.617,00)	(13,89)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	321.114.149,00	344.023.349,00	(22.909.200,00)	(6,66)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	321.114.149,00	344.023.349,00	(22.909.200,00)	(6,66)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.129.342,00	7.830.047,00	(700.705,00)	(8,95)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.129.342,00	7.830.047,00	(700.705,00)	(8,95)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	21.388.214,00	23.490.150,00	(2.101.936,00)	(8,95)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	21.388.214,00	23.490.150,00	(2.101.936,00)	(8,95)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.737.081.490,00	6.838.626.926,00	(101.545.436,00)	(1,48)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	4.254.603.788,00	2.735.450.776,00	1.519.153.012,00	55,54
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	4.254.603.788,00	2.735.450.776,00	1.519.153.012,00	55,54
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi K	690.657.890,00	0,00	690.657.890,00	100,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi K	690.657.890,00	0,00	690.657.890,00	100,00
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi K	1.791.819.812,00	4.103.176.150,00	(2.311.356.338,00)	(56,33)
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi K	1.791.819.812,00	4.103.176.150,00	(2.311.356.338,00)	(56,33)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimba	40.075.000,00	77.150.000,00	(37.075.000,00)	(48,06)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	40.075.000,00	77.150.000,00	(37.075.000,00)	(48,06)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola K	40.075.000,00	77.150.000,00	(37.075.000,00)	(48,06)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	7.628.753.507,00	9.900.852.836,00	(2.272.099.329,00)	(22,95)
8.1.02.01	Beban Barang	955.177.461,00	3.095.051.999,00	(2.139.874.538,00)	(69,14)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakal Habis	955.177.461,00	3.095.051.999,00	(2.139.874.538,00)	(69,14)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	297.054.500,00	247.822.500,00	49.232.000,00	19,87
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	15.832.500,00	(15.832.500,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis K	60.874.271,00	216.212.388,00	(155.338.117,00)	(71,85)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	31.594.240,00	46.585.888,00	(14.991.648,00)	(32,18)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cet	0,00	6.680.000,00	(6.680.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.500.000,00	5.860.000,00	(360.000,00)	(6,14)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kom	47.730.750,00	82.372.004,00	(34.641.254,00)	(42,05)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Ka	21.091.600,00	25.078.101,00	(3.986.501,00)	(15,90)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.481.000,00	12.452.333,00	3.028.667,00	24,32
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkap	3.698.100,00	80.190.244,00	(76.492.144,00)	(95,39)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Ca	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	343.189.000,00	430.467.321,00	(87.278.321,00)	(20,28)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy	0,00	1.484.023.720,00	(1.484.023.720,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	54.970.750,00	47.258.000,00	7.712.750,00	16,32
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	516.250,00	0,00	516.250,00	100,00
8.1.02.01.01.0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayan	73.477.000,00	371.700.000,00	(298.223.000,00)	(80,23)

8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	21.417.000,00	(21.417.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	5.285.735.649,00	5.461.423.705,00	(175.688.056,00)	(3,22)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	5.089.155.515,00	4.973.341.196,00	115.814.319,00	2,33
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	669.400.000,00	1.661.450.000,00	(992.050.000,00)	(59,71)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.938.042.100,00	1.917.683.600,00	1.020.358.500,00	53,21
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	206.498.000,00	173.498.000,00	33.000.000,00	19,02
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	208.197.600,00	208.197.600,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	312.296.400,00	312.296.400,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Suplr	277.596.800,00	310.596.800,00	(33.000.000,00)	(10,62)
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	6.900.000,00	(3.900.000,00)	(56,52)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	169.000.000,00	109.160.000,00	59.840.000,00	54,82
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	79.650.000,00	52.199.999,00	27.450.001,00	52,59
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	13.526.576,00	14.856.980,00	(1.330.404,00)	(8,95)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	25.984.450,00	25.230.095,00	754.355,00	2,99
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	163.692.389,00	165.453.522,00	(1.761.133,00)	(1,06)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	6.402.000,00	(6.402.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.771.200,00	9.416.200,00	355.000,00	3,77
8.1.02.02.02	Beban luran Jaminan/Asuransi	196.580.134,00	191.602.512,00	4.977.622,00	2,60
8.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	98.583.878,00	93.010.896,00	5.572.982,00	5,99
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.547.020,00	5.580.720,00	(33.700,00)	(0,60)
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	92.449.236,00	93.010.896,00	(561.660,00)	(0,60)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	259.730.000,00	(259.730.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	50.400.000,00	(50.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	42.060.000,00	(42.060.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0404	Beban Sewa Komputer Jaringan	0,00	84.320.000,00	(84.320.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0405	Beban Sewa Personal Computer	0,00	49.950.000,00	(49.950.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	18.749.997,00	(18.749.997,00)	(100,00)
8.1.02.02.10.0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuanga	0,00	18.749.997,00	(18.749.997,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	88.172.000,00	248.716.511,00	(160.544.511,00)	(64,55)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.172.000,00	248.716.511,00	(160.544.511,00)	(64,55)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	61.192.000,00	171.726.549,00	(110.534.549,00)	(64,37)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	15.830.000,00	20.224.995,00	(4.394.995,00)	(21,73)
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Da	0,00	7.175.967,00	(7.175.967,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.610.000,00	25.080.000,00	(21.470.000,00)	(85,61)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persa	5.150.000,00	14.682.000,00	(9.532.000,00)	(64,92)
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer	2.390.000,00	9.827.000,00	(7.437.000,00)	(75,68)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	1.299.668.397,00	1.040.985.621,00	258.682.776,00	24,85
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.299.668.397,00	1.040.985.621,00	258.682.776,00	24,85
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.691.597,00	22.345.621,00	2.345.976,00	10,50
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.880.000,00	70.490.000,00	45.390.000,00	64,39
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.159.096.800,00	948.150.000,00	210.946.800,00	22,25
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada P	0,00	54.675.000,00	(54.675.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Piha	0,00	54.675.000,00	(54.675.000,00)	(100,00)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	54.675.000,00	(54.675.000,00)	(100,00)
8.1.04	Beban Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
8.1.04.04	Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
8.1.04.04.01	Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
8.1.04.04.01.0001	Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
8.1.05	Beban Hibah	50.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Ker	50.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)
8.1.05.05.04	Beban Hibah kepada Koperasi	50.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)
8.1.05.05.04.0001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	50.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	19.327.283.841,00	22.306.271.344,00	(2.978.987.503,00)	(13,35)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.750.210,00	422.356.950,00	(112.606.740,00)	(26,66)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129.127.952,00	243.223.575,00	(114.095.623,00)	(46,91)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	63.368.275,00	170.816.237,00	(107.447.962,00)	(62,90)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	9.523.810,00	90.650.952,00	(81.127.142,00)	(89,49)
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	50.707.143,00	72.635.714,00	(21.928.571,00)	(30,19)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	3.137.322,00	7.529.571,00	(4.392.249,00)	(58,33)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.607.866,00	32.079.115,00	(4.471.249,00)	(13,94)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	14.527.000,00	15.567.000,00	(1.040.000,00)	(6,68)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingi	5.440.666,00	5.842.334,00	(401.668,00)	(6,88)

8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah T	1.300.200,00	4.329.781,00	(3.029.581,00)	(69,97)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pem	1.028.000,00	1.459.200,00	(431.200,00)	(29,55)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audi	1.028.000,00	1.459.200,00	(431.200,00)	(29,55)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	37.123.811,00	38.869.023,00	(1.745.212,00)	(4,49)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Compute	32.824.376,00	34.864.999,00	(2.040.623,00)	(5,85)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Pe	4.299.435,00	4.004.024,00	295.411,00	7,38
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	176.688.301,00	175.199.418,00	1.488.883,00	0,85
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	176.688.301,00	175.199.418,00	1.488.883,00	0,85
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.546.158,00	134.546.158,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.658.846,00	20.658.846,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.613.214,00	18.823.214,00	790.000,00	4,20
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	698.883,00	0,00	698.883,00	100,00
8.1.08.02.01.0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tingga	1.171.200,00	1.171.200,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.933.957,00	3.933.957,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bar	73.416,00	73.416,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	3.860.541,00	3.860.541,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pus	3.042.875,00	3.042.875,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pert	817.666,00	817.666,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	309.750.210,00	422.356.950,00	(112.606.740,00)	(26,66)
	JUMLAH BEBAN	19.637.034.051,00	22.728.628.294,00	(3.091.594.243,00)	(13,60)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19.637.034.051,00)	(22.728.628.294,00)	3.091.594.243,00	(13,60)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non L	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
7.4.01.01	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
7.4.01.01.07	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
7.4.01.01.07.0001	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OP	0,00	10.657.099,00	(10.657.099,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19.637.034.051,00)	(22.717.971.195,00)	3.080.937.144,00	(13,56)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(19.637.034.051,00)	(22.717.971.195,00)	3.080.937.144,00	(13,56)

Provinsi Bali, 15 Mei 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
NIP.197012111998031005



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	10.987.535.042	15.207.356.105
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.637.034.051)	(22.717.971.195)
RK PPKD	19.409.467.407	22.321.546.376
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	46.592.154	(3.823.396.244)
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154	-
EKUITAS AKHIR	10.806.560.552	10.987.535.042

Provinsi Bali, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Dr. I Wayan Kadina, S.E., M.Si
NIP. 197012111998031005

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



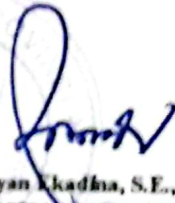
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023



URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	10.987.535.042	15.207.356.105
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.637.034.051)	(22.717.971.195)
RK PPKD	19.409.467.407	22.321.546.376
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	46.592.154	(3.823.396.244)
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154	-
EKUITAS AKHIR	10.806.560.552	10.987.535.042

Provinsi Bali, 15 Mei 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Dr. I Wayan Ekadha, S.E., M.Si.
NIP. 197012311998031005

Ditetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



ບໍລິຫານຖານະບໍລິຫານ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະໜອງການບໍລິຫານ ກຸ່ມບາ ທີ່ສິນເປີ ທາງ ຍີ່ລັດຖະ

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ຄະນະການບໍລິຫານ ກຸ່ມບາ ທີ່ສິນເປີ ທາງ ຍີ່ລັດຖະ (ບໍລິຫານ) ກຸ່ມບາ ທີ່ສິນເປີ ທາງ ຍີ່ລັດຖະ (ບໍລິຫານ) ທຸລະກິດ ທີ່ສິນເປີ ທາງ ຍີ່ລັດຖະ

Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar - Bali (80236), Telepon (0361) 225091

Laman : www.diskopukm.baliprov.go.id, Pos-el : diskopukm@baliprov.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, hasil Operasi dan Perubahan Ekuitas suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- h) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali No 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- i) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.3. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

1. Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beralamat di Jalan WR. Supratman No. 71 Denpasar;
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakanteknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi,
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,

- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 136 orang berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga Non ASN (kontrak) adalah :

PangkatGolongan IV/c	:	1 orang
Pangkat/Golongan IV/b	:	5 orang
Pangkat/Golongan IV/a	:	6 orang
Pangkat/Golongan III/d	:	15 orang
Pangkat/Golongan III/c	:	5 orang
Pangkat/Golongan III/b	:	11 orang
Pangkat/Golongan III/a	:	10 orang
Pangkat/Golongan II/d	:	2 orang
Pangkat/Golongan II/c	:	3 orang
Pangkat/Golongan II/b	:	1 orang
Pangkat/Golongan I/d	:	1 orang
Pegawai Non ASN	:	69 orang
Jumlah	:	129 orang

1.4 .SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional (LO)
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ekonomi makro Provinsi Bali pada tahun 2023 sudah mulai membaik seiring pulihnya pariwisata Bali. Walau belum mencapai tingkat kunjungan sebelum pandemi, kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,362.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9

	Orang)				
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks **Gini** atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy*

life), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023*

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,0 6	11.710, 25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D (pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.7 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90

2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Pengalihan	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalian	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran;	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalan	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalian	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	4.733,26	4.773,48	4.879,57

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Ulang			
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalan	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Pengalihan	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,7 9	245.362.879,3 1	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2023. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp. 2.165.387.884,00- yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 21.543.645.124,00- terealisasi sebesar Rp. 19.378.257.240,00- atau 89,95%.

Capaian bagian belanja sebesar Rp 19.378.257.240,00- atau 89,95% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

No	PROGRAM	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.166732.546,00	15.162.882.072,00	88,33%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.603.195.434,00	13.822.138.203,00	88,58%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.873.292,00	78.344.117,00	99,33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.323.500,00	2.249.200,00	96,80%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.142.384.786,00	11.632.298.785,00	88,51%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.100,00	9.895.000,00	98,96%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.298.700,00	36.622.776,00	82,67%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	54.400.000,00	98,91%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.187.700,00	7.776.250,00	63,80%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	1.548.750,00	34,42%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.611.000,00	25.923.410,00	36,71%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.940.000	48.500.000,00	85,18%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.991.000	1.810.000,00	90,91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.000.000	191.707.759,00	90,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.147.400	939.147.400,00	100,00%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.088.872	611.019.572,00	87,46%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	9.540.000,00	19,08%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.850.084	171.355.184,00	99,71%
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	259.249.380,00	242.297.82500	93,46%
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.636.000	12.107.250,00	58,67%
	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	238.613.380	230.190.575,00	96,47%
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	46.919.800	23.683.900,00	50,48%
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	17.119.800	11.299.750,00	66,00%
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	29.800.000	12.384.150,00	41,56%
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.491.392,00	104.836.292,00	88,48%
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.491.392	104.836.292,00	88,48%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	316.561.180	297.374.467,00	93,94
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	200.525.888	188.262.182,00	93,88%
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	116.035.292	109.112.284,00	94,03
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	822.315.360	672.551.385,00	81,79%

	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	822.315.360	672.551.385,00	81,79%
	UPTD DIKLAT KOPERASI UMKM	4.376.912.578,00	4.215.375.168,00	96,31%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	414.194.572,00	353.653.356,00	85,38%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.400	661.000,00	99,19%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900	2.479.000,00	90,94%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	685.600	536.000,00	78,18%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.001.000	910.000,00	90,91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	14.342.784,00	29,57%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.870.296	71.419.196,00	74,50%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000	1.610.000,00	56,49%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.131.792	75.131.792,00	100,00%
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.718.006	3.861.721.812,00	97,45
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.718.006	3.861.721.812,00	97,45
	Jumlah	21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95%

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran (LRA 64).

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% ke bawah).

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terdapat Kegiatan yang serapannya belanjanya di bawah 80% yaitu:

Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi (%)	Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provis	100	50,48	SE Nomor 5232 Tahun 2023, Tanggal 7 Juli 2023 dan SE Nomor 8004 Tahun 2023 Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah dan adanya efisiensi sesuai dengan pemakaian
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provis	100	58,67	SE Nomor 5232 Tahun 2023, Tanggal 7 Juli 2023 dan SE Nomor 8004 Tahun 2023 Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah dan adanya efisiensi sesuai dengan pemakaian

3.2. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi OPKD (SA OPKD) yang dilaksanakan pada OPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA OPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda. Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya (lampiran 3) dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas

wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akruwal mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
- 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan

- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO,

melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran

berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di

bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.

- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. **Barang Pakai Habis**
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. **Barang Tak Habis Pakai**
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. **Barang Bekas Dipakai**
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. **Metode Perpetual**
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan.
- b. **Metode Periodik**
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. **Investasi Jangka Pendek**
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan dikelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan

- kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. Penambahan masa manfaat
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
- Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
 - 2) Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset

tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. Aset Bersejarah
- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. Penghentian dan Pelepasan
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
- Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi

aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan

suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

- 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas

anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
 - Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya

pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

- 2) Lisensi dan Francise
Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3) Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
- 4) Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 5) Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- 6) Kajian
Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
- 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
- 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

- d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan,

diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih

dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan

jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- b. Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit – LO pada periode bersangkutan

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang

terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam Tahun 2018 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023

Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2023 terdiri dari :

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2023 dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran sebesar Rp 21.543.645.124,00 realisasinya sebesar Rp 19.378.257.240,00- atau 89,95%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Operasi	21.486.705,124,00	19.329.757.240,00	89,96%.
2.	Belanja Modal	56.940.000,00	48.500.000,00	85,18%
Jumlah Belanja		21.543.645.124,00	19.378.257.240,00	89,95%.

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp 21.486.705.124,00 realisasi sebesar Rp 19.329.757.240,00 atau 89,96%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	13.142.384.786,00	11.632.298.785,00	88,51%

2.	Belanja Barang dan Jasa	8.269.320.338,00	7.622.458.455,00	92,18%
3	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	100%
4.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
Jumlah Belanja Operasi		21.486.705.124,00	19.329.757.240,00	89,96%.

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran sebesar Rp. **13.142.384.786,00** Terealisasi sebesar Rp. **11.632.298.785,00** atau **88,51%**. Realisasi tersebut merupakan **60,18%** dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	Gaji dan Tunjangan	5.573.849.667,00	4.847.922.364,00	86,98%
	Tambahan Penghasilan PNS	7.481.320.119,00	6.744.301.421,00	90,15%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	87.215.000,00	40.075.000,00	45,95%
	Jumlah Belanja Pegawai	13.142.384.786,00	11.632.298.785,00	88,51%.

1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran sebesar Rp. **8.269.320.338,00** realisasi pengeluaran sebesar Rp. **7.622.458.455,00** atau **92,18%**. Realisasi tersebut merupakan **39,43%** dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.009.702.668,00	946.035.281,00	93,69 %
2	Belanja Jasa Kantor	5.228.390.450,00	5.092.002.643,00	97,39%
3	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	197.774.424,00	196.580.134,00	99,40%

4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64.161.000,00	0,00	0,00%
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	00,00	0,00%
6	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00%
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	289.650.000,00	88.172.000,00	30,44%
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.460.141.796,00	1.299.668.397,00	89,01%
9	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	0,00	0,00%
10	Belanja Subsidi Kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
11	Belanja Hibah Kepada Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
Jumlah		8.269.320.338,00	7.622.458.455,00	92,18%

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.940.000.00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 48.500.000,00.

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesindengan target anggaran setelah perubahan sebesar 56.940.000.,00 realisasi pengeluaran sebesar 48.500.000,00 atau 85,18%.

Realisasi tersebut merupakan 85,18,00% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal Alat Pendingin	12.070.000,00	11.600.000,00	96,11%
2	Belanja Modal Personal Komputer	37.500.000,00	30.000.000,00	80,00%
1	Belanja Peralatan Komputer Lainnya	7.370.000,00	6.900.000,00	93,62%
Jumlah		56.940.000,00	48.500.000,00	85,18%

1.2 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

Realisasi tersebut merupakan 0.00% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan.	0,00	0,00	0 %

1.3 Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan

Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,00 atau 0% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal Perencanaan Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan	0	0	0%

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan-LO merupakan Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang.

Jumlah Pendapatan-LO Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 00,00

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Tahun 2023 sebesar R.p 19.637.034.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Operasi

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2023 sebagai berikut :

URAIAN		TAHUN 2023	
BEBAN			
	BEBAN OPERASI	Rp	19.327.283.841,00
	Beban Pegawai	Rp	11.623.530.334,00
	Beban Barang dan Jasa	Rp	7.628.753.507,00
	Beban Subsidi	Rp	25.000.000,00
	Beban Hibah	Rp	50.000.000,00
	BEBAN PENYUSUTAN	Rp	309.750.210,00
	Beban Penyusutan	Rp	309.750.210,00

1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Terealisasi sebesar Rp. 11.623.530.334,00 atau 60,14% dari beban operasi secara keseluruhan Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
Beban Pegawai.			
1	Beban Gaji dan Tunjangan	Rp.	4.846.373.844,00
2	Beban Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp.	6.737.081.490,00
3	Beban Honorarium PNS	Rp.	40.075.000,00
Jumlah Beban Pegawai		Rp.	. 11.623.530.334,00

1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 7.628.753.507,00. atau 39,47% dari beban operasi secara keseluruhan. Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
Beban Barang dan Jasa			
1	Beban Barang dan Jasa	Rp.	7.628.753.507,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa		Rp.	7.628.753.507,00

1.2 Beban Subsidi

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 0,13 % dari Beban Operasi secara keseluruhan. Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
Beban Subsidi			
1	Beban Subsidi	Rp.	25.000.000,00
Jumlah Beban Subsidi		Rp.	25.000.000,00

1.3 Beban Hibah

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 0,26 % dari Beban Operasi secara keseluruhan. Realisasi tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
Beban Subsidi			
1	Beban Hibah	Rp.	50.000.000,00
Jumlah Beban Hibah		Rp.	50.000.000,00

1.4 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan terealisasi sebesar Rp. 309.750.210 terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi	
Beban Penyusutan Aset Tetap			
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	129.127.952,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	176.688.301,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	3.933.957,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	-
5	Beban Penyusutan Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp.	-
Jumlah Beban Penyusutan		Rp	309.750.210,00

5.2.3. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO dan Beban selama periode Tahun 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengalami Defisit Operasional sebesar Rp 19.637.034.051,00

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran JumlahRp.0,00 karena Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 3.795.531,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2023 yang terdiri dari :

Bank BPD No.Rek 010010001884-3	Rp	3.975.531,00
Uang Tunai	Rp	00,00
Jumlah	Rp	3.975.531,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2023 dan rekening koran bank.

b.Persediaan **Rp** **2.253.800,00**

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2023 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Persediaan ATK	0,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	139.800,00
3	Persediaan Prangko, Materai	60.000,00
4	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	704.000,00
5	Bahan Komputer	1.350.000,00
5	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00
Jumlah persediaan		2.253.800,00

2. Aset Tetap

a. Tanah

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.553.815.000,00.Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Mutasi Aset Tetap Tanah s.d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Tanah Tahun 2023 :	Rp.	-
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	4.553.815.000,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	00,00
4	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	0,00
	a.Mutasi Antar Perangkat Daerah	Rp.	0,00
Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2023		Rp.	4.553.815.00,00

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 8.697.575.714,00. Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023	Rp.	-
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	8.611.483.560,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	86.092.154,00
	Koreksi Pencatatan Saldo Awal		46.592.154,00
	Mutasi Antar Perangkat Daerah		39.500.000,00
4	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	0,00
	Mutasi Antar Perangkat Daerah	Rp.	0,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2023		Rp.	8.697.575.714,00

c Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5,311,961,475.00. Rincian peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023 :	
2	Saldo Awal Tahun 2023	5.262.901.475,00
3	Penambahan Tahun 2023	49.060.000,00
	a. Belanja Modal	48.500.000,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal (mutase antar OPD)	560.000,00
4	Pengurangan	0,00
	a. Reklas ke Aset Lainnya	0,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2023		5.311.961.475,00

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.**Instalasi Listrik dan Telepon**

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 149.181.650,00. Rincian Mutasi aset Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2023	Rp.	
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	149.181.650,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	00,00
4	Pengurangan Tahun 2023 (Mutasi Antar Perangkat Daerah)	Rp.	0,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. 31 Desember 2023		Rp.	149.181.650,00

e. Aset Tetap Lainnya.

Buku/Perpustakaan

Saldo Aset Buku/Perpustakaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.573.000,00. Rincian Mutasi aset Buku/Perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Buku/Perpustakaan Tahun 2023 :	Rp.	
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	11.573.000,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	
4	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	0,00
	Reklas KeAset Lainnya	Rp.	0,00
Saldo Akhir Buku/Perpustakaan sd. 31 Desember 2023		Rp.	11.573.000,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 179.168.660,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah	
1	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 :	Rp.	
2	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	179.168.660,00
3	Penambahan Tahun 2023	Rp.	00,00
4	Pengurangan Tahun 2023	Rp.	00,00
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan sd. 31 Desember 2023		Rp.	179.168.660,00

3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2022, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD versi.272, disajikan dengan perhitungan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 dan Penyusutan murni Tahun 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Penambahan/Pengurangan		Saldo Akhir Tahun 2023
			Tahun 2023		
			Bertambah	Berkurang	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.062.011.467,00	129.687.952,00	0,	5.191.699.419,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.172.593.259,00	183.074.134,00	0	2.355.667.393,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.883.471,00	3.933.957,00	0	34.817.428,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		7.265.488.197,00	316.696.043,00	0	7.582.184.240,00

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00. Rincian Mutasi aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah	
Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023 :			
1	Saldo Awal Tahun 2023	Rp.	143.030.375,00
2	Penambahan Tahun 2023	Rp.	0,00
3	Pengurangan (Penghapusan)	Rp.	143.030.375,00
Saldo Akhir Aset Lainnya/d. 31 Desember 2023		Rp.	0,00

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internal.

5.3.2 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang PFK

Rp,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Pemungutan	Penyetoran	Saldo
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0,00	0,00	
2	PPH Pasal 21	670.630.584,00	670.630.584,00	
3	PPH Pasal 22	7.233.528,00	7.233.528,00	
4	PPH Pasal 23	11.405.230,00	11.405.230,00	
5	PPN	97.842.646,00	97.842.646,00	
Jumlah		787.112.048,00	787.112.048,00	

b. Utang Belanja

Utang Belanja sebesar Rp. 516.784.507,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 500.266.098,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 16.518.409,00 Utang Belanja tersebut merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa berupa utang pembayaran listrik, telpon dan air yang pemakaiannya bulan Desember 2023 dan dibayarkan pada Bulan Januari 2024

Uang Muka Dari Kas Daerah

Rp.00,00

Tidak ada Uang Muka dari Kas Daerah karena sisa kas sebesar Rp. 3.795.531,00 sudah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2023 sehingga Kas pada Bendahara Pengeluaran Nihil.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan kebijakan Kapitalisasi aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga melaksanakan Penyusutan atas aset tetap sampai dengan Tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap Ekuitas.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

No	URAIAN	2023
1	Ekuitas Awal	10.976.877.943,00
2	RK-PPKD	19.409.467.407,00
3	Surplus (Defisit-LO)	(19.637.034.051,00)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(0,00)
5	LAIN-LAIN	46.592.154,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.592.154,00
6	Ekuitas Akhir	10.795.903.453,00

Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor : B.25.900/ 50 /SET/DisKopUKM

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Petugas Akuntansi OPD dengan Petugas Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

Petugas Akuntansi OPD menyampaikan bahan rekonsiliasi, berupa:

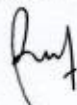
1. Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2023
2. Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember Tahun 2023
3. Laporan Penutupan Kas tanggal 29 Bulan Desember Tahun 2023
4. Rekening Koran tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2024

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam *Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)* ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan Hasil Rekonsiliasi ini, akan dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali



Kadek Rosita Dewi, SE
NIP. 19890312 201101 2 006

Urusan Akuntansi
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,



Ni Nyoman Teniari, SH
NIP. 19760403 200701 2 015

Mengetahui / Mengesahkan

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Bali,



I Putu Sudano, S.E., M.A.P
Penata Tk. I
NIP. 19740201 199603 1 001

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali,



Ni Luh Made Mawar, S.Sos., M.A.P
Pembina
NIP. 19730803 199303 2 004

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN HASIL REKONSILIASI PETUGAS AKUNTANSI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023

No. urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Akuntansi	Bendahara Pengeluaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Kas Bendahara	-	-	Sesuai
	5	BELANJA DAERAH	19,378,257,240.00	19,378,257,240.00	Sesuai
	5.1	BELANJA OPERASIONAL	19,329,757,240.00	19,329,757,240.00	Sesuai
	5.1.01	Belanja Pegawai	11,632,298,785.00	11,632,298,785.00	Sesuai
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7,622,458,455.00	7,622,458,455.00	Sesuai
	5.1.04	Belanja Subsidi	25,000,000.00	25,000,000.00	Sesuai
	5.1.05	Belanja Hibah	50,000,000.00	50,000,000.00	Sesuai
	5.2	Belanja Modal	48,500,000.00	48,500,000.00	Sesuai
		Jumlah :	19,378,257,240.00	19,378,257,240.00	Sesuai

Denpasar, 5 Januari 2024
 Petugas Akuntansi
 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Provinsi Bali



Ni Nyoman Teniari, SH
 Nip. 19760403 200701 2 015

Bendahara Pengeluaran
 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 Provinsi Bali



Fridolin Raja Samuel Manurung, A.Md.Ak.
 Nip. 19990802 202102 1 001

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : B.25.900/ 32 /SET/DiskopUKM

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fridolin Raja Samuel Manurung,A.Md.Ak

NIP : 19990802 202102 1 001

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** ;

Nama : Ni Nyoman Teniari,SH

NIP : 19760403 200701 2 015

Jabatan : Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** ;

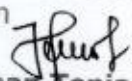
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah melakukan rekonsiliasi terhadap belanja dengan mencocokkan Realisasi Belanja yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan bukti-bukti dengan Urusan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan SIPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali untuk periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi Belanja

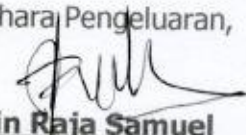
No	Kode Rekening	Uraian	Menurut Bendahara Pengeluaran	Menurut Urusan Akuntansi	Keterangan
	5	BELANJA DAERAH	19.378.257.240,00	19.378.257.240,00	
	5.1	Belanja Operasi	19.329.757.240,00	19.329.757.240,00	
	5.1.01	Belanja Pegawai	11.632.298.785,00	11.632.298.785,00	
	5.1.02	Belanja Barang Jasa	7.622.458.455,00	7.622.458.455,00	
	5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	
	5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
	5.2.	Belanja Modal	48.500.000,00	48.500.000,00	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan


Ni Nyoman Teniari,SH
NIP.19760403 200701 2 015

Bendahara Pengeluaran,


**Fridolin Raja Samuel
Manurung,A.Md.Ak**
Nip. 19990802 202102 1 001

Mengetahui,
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Ni Luh Made Mawar, S.Sos., M.AP

Pembina

NIP.19730803 199303 2 004



ပိတောက်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ဥပဒေ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

တက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ ဥပဒေ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

JL. WR. SUPRATMAN NO. 71 DENPASAR (80236), TELP. (0361) 225091

WEBSITE : www.diskopukm.baliprov.go.id, EMAIL : diskopukm@baliprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : B.25.028/3136/SET/DisKopUKM

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI.

Pada hari ini Jumat tanggal lima belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami telah melakukan rekonsiliasi penambahan/pengurangan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Awal	Aset	Akuntansi	Selisih
		Januari 2023	Desember 2023	Desember 2023	
I.	ASET TETAP				
1	Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00	
2	Peralatan dan Mesin	5.262.901.475,00	5.311.961.475,00	5.311.961.475,00	
3	Gedung dan Bangunan	8.611.483.560,00	8.697.575.714,00	8.697.575.714,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.181.650,00	149.181.650,00	149.181.650,00	
5	Aset Tetap Lainnya	11.573.000,00	11.573.000,00	11.573.000,00	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.168.660,00	179.168.660,00	179.168.660,00	
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.265.488.197,00)	(7.582.184.240,00)	(7.582.184.240,00)	
	JUMLAH	11.502.635.148,00	11.321.091.259,00	11.321.091.259,00	
II.	ASET LAINNYA				
1	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
2	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	
3	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	
4	Aset lain-lain	143.030.375,00	-	-	
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(141.126.375,00)	-	-	
	JUMLAH	1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	

I. ASET TETAP	ASET	AKUNTANSI
A. Aset Tetap Tanah	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
Saldo Awal	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah		
- Penghapusan		
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	4.553.815.000,00	4.553.815.000,00

B. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.311.961,475.00	5.311.961,475.00
Saldo Awal	5.262.901,475.00	5.262.901,475.00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	48,500,000.00	48,500,000.00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	560,000.00	560,000.00
Jumlah Mutasi Tambah	49,060,000.00	49,060,000.00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00

- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		
Saldo Akhir	5,311,961,475.00	5,311,961,475.00

C. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

	<u>8,697,575,714.00</u>	<u>8,697,575,714.00</u>
Saldo Awal	8,611,483,560.00	8,611,483,560.00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	46,592,154.00	46,592,154.00
- Mutasi antar OPD	39,500,000.00	39,500,000.00
Jumlah Mutasi Tambah	86,092,154.00	86,092,154.00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang		
Saldo Akhir	8,697,575,714.00	8,697,575,714.00

D. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

	<u>149,181,650.00</u>	<u>149,181,650.00</u>
Saldo Awal	149,181,650.00	149,181,650.00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00

- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Dibawah Kapitalisasi		
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	149,181,650.00	149,181,650.00

E. Aset Tetap Lainnya

	11,573,000.00	11,573,000.00
Saldo Awal	11,573,000.00	11,573,000.00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	11,573,000.00	11,573,000.00

F. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

	179,168,660.00	179,168,660.00
Saldo Awal	179,168,660.00	179,168,660.00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal		
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	179,168,660.00	179,168,660.00

G. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	(7.582.184.240.00)	(7.582.184.240.00)
Saldo Awal	(7.265.488.197.00)	(7.265.488.197.00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Penyusutan	(309.750.210.00)	(309.750.210.00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(6.945.833.00)	(6.945.833.00)
Jumlah Mutasi Tambah	(316.696.043.00)	(316.696.043.00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Akumulasi atas Aset Tetap yang D hibahkan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(7.582.184.240.00)	(7.582.184.240.00)

II. Aset Lainnya	0,00	0,00
A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
B. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(0,00)	(0,00)
D. Aset Lain - Lain	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

A. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah	0,00	0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akm. Peny. Aset Kemitraan Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
1. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Tanah:		
Saldo Awal	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
2. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa Gedung dan Bangunan		
Saldo Awal		
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Mutasi Tambah:	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
Mutasi Kurang:	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
✓ Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

✓ Akm. Peny. Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Dibawah Kapitalisasi	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
- Harga Perolehan	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(0,00)

B. Aset Tidak Berwujud

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00	0,00
- Penerimaan Hibah	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	0,00	0,00
- Pengeluaran Hibah	0,00	0,00
- Penghapusan	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Lainnya	0,00	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
- Mutasi antar OPD	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir	0,00	0,00

C. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Beban Amortisasi	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari Perolehan Hibah	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang D hibah	(0,00)	(0,00)
- Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang Dihapuskan Langsung	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Tetap	(0,00)	(0,00)

- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir	(0,00)	(0,00)

D. Aset Lain - Lain

	0,00	0,00
Aset Tetap Rusak Berat	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	0,00	0,00
Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Persediaan yang akan D hibahkan	0,00	0,00
Aset Lain - Lain Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian mutasi Aset Lain - Lain sebagai berikut:

1. Aset Tetap Rusak Berat:

Saldo Awal	143.030.375,00	143.030.375,00
- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	0,00	0,00
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	0,00	0,00
Jumlah Saldo Awal	0,00	0,00
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	0,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	143.030.375,00	143.030.375,00
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Koreksi pencatatan Saldo Awal	0,00	0,00
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	143.030.375,00	143.030.375,00
Saldo Akhir	0,00	0,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

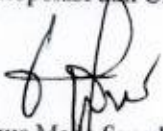
Saldo Awal		
- Akm. Peny. Peralatan dan Mesin Rusak Berat	(141.126.375,00)	(141.126.375,00)
- Akm. Peny. Gedung dan Bangunan Rusak Berat	(0,00)	(0,00)
Jumlah Saldo Awal	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Reklasifikasi dari:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(0,00)	(0,00)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi ke:		
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Penghapusan:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(141.126.375,00)	(141.126.375,00)
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal:	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
✓ Akm. Peny. Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(141.126.375,00)	(141.126.375,00)
Saldo Akhir	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(0,00)	(0,00)
- Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)

Pengurus Barang
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali



Sudarmin, SH.
NIP. 19700817 220701 1 054

Pejabat Penatusahaan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali



Ida Bagus Made Suardita, SH.
NIP. 19690705 200901 1 009

Admin BMD



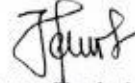
Muhammad Danto, A.Md.Ak.
NIP. 19990824 202102 1 001

Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
BMD



Luh Nyoman Widiatmikawati, SH.MH.
NIP. 19680102 199803 2 006

Urusan Akuntansi dan Pelaporan
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali



Ni Nyoman Teniari, SH.
NIP. 19760403 200701 2 015

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali



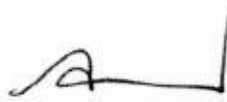
Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si.
NIP. 19701214 199803 1 005

Admin Akuntansi



Kadek Rosita Dewi, SE.
NIP. 19890312 201110 2 006

Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan



I Putu Sudano, SE., M.AP.
NIP. 19740201 199603 1 001

JL. RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL DI PANJAITAN RENON DENPASAR

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2023 S/D 31-12-2023

360 IDR INDONESIA RUPIAH

Hal 1 dari 3

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arslp	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			31,222,717.00		
05/12/2023	299	22.00/04.0/000415/LS/2.17.0.00.0.00.0	O1767.0308	11,225,000.00 CR	42,447,717.00 CR	O1767	010
05/12/2023	199	HONOR TENAGA AHLI KE 0180202181451	O1767.0310	11,225,000.00 DB	31,222,717.00 CR	O1767	010
08/12/2023	458	TELKOM_0361224557	IBB38.25685	37,623.00 DB	31,185,094.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	F_TELKOM_0361224557	IBB38.25685	2,000.00 DB	31,183,094.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050220000148	00038.25929	1,751,575.00 DB	29,431,519.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050220000148	00038.25929	2,000.00 DB	29,429,519.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	PLNPOS_551004047598	00038.25281	2,243,380.00 DB	27,186,139.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	F_PLNPOS_551004047598	00038.25281	2,500.00 DB	27,183,639.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	PLNPOS_551001732803	00038.25391	5,086,496.00 DB	22,097,143.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	F_PLNPOS_551001732803	00038.25391	2,500.00 DB	22,094,643.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050250005606	00038.26023	131,000.00 DB	21,963,643.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050250005606	00038.26023	2,000.00 DB	21,961,643.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	TELKOM_0361729253	IBB38.25625	341,880.00 DB	21,619,763.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	F_TELKOM_0361729253	IBB38.25625	2,000.00 DB	21,617,763.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050490018690	00038.25880	281,425.00 DB	21,336,338.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050490018690	00038.25880	2,000.00 DB	21,334,338.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	PLNPOS_551000583053	00038.25119	400,471.00 DB	20,933,867.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	F_PLNPOS_551000583053	00038.25119	2,500.00 DB	20,931,367.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	TELKOM_0361225091	IBB38.25729	31,857.00 DB	20,899,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	F_TELKOM_0361225091	IBB38.25729	2,000.00 DB	20,897,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050220000148	00038.25929	1,751,575.00 CR	22,649,085.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_050220000148	00038.25929	2,000.00 CR	22,651,085.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050250005606	00038.26023	131,000.00 CR	22,782,085.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_050250005606	00038.26023	2,000.00 CR	22,784,085.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050490018690	00038.25880	281,425.00 CR	23,065,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_050490018690	00038.25880	2,000.00 CR	23,067,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_030800003008	00038.25976	347,000.00 DB	22,720,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00038.25976	2,000.00 DB	22,718,510.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	PLNPOS_551003959410	00038.25459	4,486,759.00 DB	18,231,751.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	F_PLNPOS_551003959410	00038.25459	2,500.00 DB	18,229,251.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	TELKOM_0361226548	IBB38.25803	248,307.00 DB	17,980,944.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	458	F_TELKOM_0361226548	IBB38.25803	2,000.00 DB	17,978,944.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00038.25976	347,000.00 CR	18,325,944.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00038.25976	2,000.00 CR	18,327,944.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	PLNPOS_551000688819	00038.25334	2,584,985.00 DB	15,742,959.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	491	F_PLNPOS_551000688819	00038.25334	2,500.00 DB	15,740,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050490018690	00038.25880	281,425.00 DB	15,459,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050490018690	00038.25880	2,000.00 DB	15,457,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050220000148	00038.25929	1,751,575.00 DB	13,705,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050220000148	00038.25929	2,000.00 DB	13,703,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_030800003008	00038.25976	347,000.00 DB	13,356,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00038.25976	2,000.00 DB	13,354,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	DPS_050250005606	00038.26023	131,000.00 DB	13,223,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	F_DPS_050250005606	00038.26023	2,000.00 DB	13,221,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050250005606	00038.26023	131,000.00 CR	13,352,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_050250005606	00038.26023	2,000.00 CR	13,354,459.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050220000148	00038.25929	1,751,575.00 CR	15,106,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00038.25976	347,000.00 CR	15,453,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_050220000148	00038.25929	2,000.00 CR	15,455,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00038.25976	2,000.00 CR	15,457,034.00 CR	IBBIS	010
08/12/2023	474	R_DPS_050490018690	00038.25880	281,425.00 CR	15,738,459.00 CR	IBBIS	010

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2023 S/D 31-12-2023

360 IDR INDONESIA RUPIAH

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			15,738,459.00		
08/12/2023	474	R_F_DPS_050490018690	00038.25880	2,000.00 CR	15,740,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	410	TRF KE 129 0370202088080 NI PUTU AYU OKA ARINI VIA INTERNET BANKING	IBB39.30960	1,050,000.00 DB	14,690,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	471	MPN_028334363357048	IBB39.84036	10,800.00 DB	14,679,659.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 DB	14,332,659.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 DB	14,330,659.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	410	TRF KE 129 0450202307423 I WAYAN SIWI SUYASA VIA INTERNET BANKING	IBB39.84498	529,200.00 DB	13,801,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	471	MPN_028334355978122	IBB39.84147	95,121.00 DB	13,706,338.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	471	MPN_028334360236102	IBB39.84087	697,559.00 DB	13,008,779.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050220000148	00039.30720	1,751,575.00 DB	11,257,204.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050220000148	00039.30720	2,000.00 DB	11,255,204.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	410	TRF KE 129 0100202399121 I KETUT RAUH VIA INTERNET BANKING	IBB39.31117	1,050,000.00 DB	10,205,204.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	410	TRF KE 129 0100202384084 NI KADEK NAPIANI VIA INTERNET BANKING	IBB39.84437	6,246,320.00 DB	3,958,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050250005606	00039.30638	131,000.00 DB	3,827,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050250005606	00039.30638	2,000.00 DB	3,825,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050490018690	00039.30778	281,425.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050490018690	00039.30778	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 CR	3,889,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 CR	3,891,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_050220000148	00039.30720	1,751,575.00 CR	5,643,034.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_050220000148	00039.30720	2,000.00 CR	5,645,034.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_050490018690	00039.30778	281,425.00 CR	5,926,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_050490018690	00039.30778	2,000.00 CR	5,928,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 DB	5,581,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 DB	5,579,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050220000148	00039.30720	1,751,575.00 DB	3,827,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050220000148	00039.30720	2,000.00 DB	3,825,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050490018690	00039.30778	281,425.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050490018690	00039.30778	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 CR	3,889,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_050490018690	00039.30778	281,425.00 CR	4,170,884.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_050220000148	00039.30720	1,751,575.00 CR	5,922,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 CR	5,924,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_050220000148	00039.30720	2,000.00 CR	5,926,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_050490018690	00039.30778	2,000.00 CR	5,928,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050490018690	00039.85191	281,425.00 DB	5,647,034.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050490018690	00039.85191	2,000.00 DB	5,645,034.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_050220000148	00039.85158	1,751,575.00 DB	3,893,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_050220000148	00039.85158	2,000.00 DB	3,891,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.85119	347,000.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.85119	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00039.85119	347,000.00 CR	3,889,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00039.85119	2,000.00 CR	3,891,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00039.30683	347,000.00 CR	3,889,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00039.30683	2,000.00 CR	3,891,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.85119	347,000.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.85119	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010

RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA

JL DI PANJAITAN RENON DENPASAR

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01-12-2023 S/D 31-12-2023


360 IDR INDONESIAN RUPIAH

Hal 3 dari 3

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	OP-ID	LTx
		Saldo Sebelumnya			3,542,459.00		
11/12/2023	474	R_DPS_030800003008	00039.85119	347,000.00 CR	3,889,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	R_F_DPS_030800003008	00039.85119	2,000.00 CR	3,891,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	DPS_030800003008	00039.85581	347,000.00 DB	3,544,459.00 CR	IBBIS	010
11/12/2023	474	F_DPS_030800003008	00039.85581	2,000.00 DB	3,542,459.00 CR	IBBIS	010
18/12/2023	410	TRF DR 129 0100105000711 BEND PENG PEMB UPTD DIKLAT KOP VIA INTERNET BANKING PENGEMBALIAN UANG PERSEDIAAN	IBB43.77284	753,072.00 CR	4,295,531.00 CR	IBBIS	010
28/12/2023	410	TRF KE 129 0370202088080 NI PUTU AYU OKA ARINI VIA INTERNET BANKING	IBB52.60700	250,000.00 DB	4,045,531.00 CR	IBBIS	010
28/12/2023	410	TRF KE 129 0100202399121 I KETUT RAUH VIA INTERNET BANKING	IBB52.60984	250,000.00 DB	3,795,531.00 CR	IBBIS	010
28/12/2023	410	TRF KE 129 0100100000001 RKUD PROV BALI VIA INTERNET BANKING	IBB52.78790	3,795,531.00 DB	0.00	IBBIS	010
29/12/2023	299	JAGIR Dec, 2023	JAGIR.-2140	6,396.53 CR	6,396.53 CR	K2083	010
29/12/2023	199	JAGIR -> 010-0100000001	AFI-2.140	6,396.53 DB	0.00	K2083	010
Total Mutasi CR :		22,841,468.53					
Total Mutasi DB :		54,064,185.53					

Bilamana selama 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 10-January-2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
KANTOR CABANG RENON

()

PROVINSI BALI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ - FUNGSIONAL
Bulan : Desember

Nomor SPJ : 22.00/05.0/000029/SPJ-SKPD/2.17.0.00.0.00.01.0000/P.05/1/2024
SKPD : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pengguna Anggaran : Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
Bendahara Pengeluaran : FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.Md.Ak. (Bendahara Pengeluaran)
Tahun Anggaran : 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 6=(4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 9=(7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini 12=(10+11)		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp21.543.645.124	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661	Rp533.422.279	Rp31.309.515	Rp564.731.794	Rp19.378.257.240	Rp2.165.387.884
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.486.705.124	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp6.325.137.373	Rp807.589.288	Rp7.132.726.661	Rp533.422.279	Rp31.309.515	Rp564.731.794	Rp19.329.757.240	Rp2.156.947.884
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.269.320.338	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.300.137.373	Rp757.589.288	Rp7.057.726.661	Rp533.422.279	Rp31.309.515	Rp564.731.794	Rp7.622.458.455	Rp646.861.883
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp13.142.384.786	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.632.298.785	Rp1.510.086.001
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.05	Belanja Hibah	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rp17.166.732.546	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp2.547.454.333	Rp466.161.644	Rp3.013.615.977	Rp488.787.052	Rp28.180.258	Rp516.967.310	Rp15.162.882.072	Rp2.003.850.474
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp15.603.195.434	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp1.536.070.640	Rp275.681.008	Rp1.811.751.648	Rp349.907.512	Rp28.180.258	Rp378.087.770	Rp13.822.138.203	Rp1.781.057.231
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp81.196.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp5.461.525	Rp0	Rp5.461.525	Rp80.593.317	Rp603.475
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp78.873.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp3.212.325	Rp0	Rp3.212.325	Rp78.344.117	Rp529.175
5.1	BELANJA OPERASI	Rp78.873.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp3.212.325	Rp0	Rp3.212.325	Rp78.344.117	Rp529.175
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp78.873.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp3.212.325	Rp0	Rp3.212.325	Rp78.344.117	Rp529.175
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.741.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.212.325	Rp529.175
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.741.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.212.325	Rp529.175
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.307.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp997.825	Rp0	Rp997.825	Rp997.825	Rp309.775
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp391.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp349.500	Rp0	Rp349.500	Rp349.500	Rp42.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.042.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.865.000	Rp0	Rp1.865.000	Rp1.865.000	Rp177.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp955.432	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.732.592	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp479.144	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.874.864	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp26.960	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.760	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp449.328	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.695.968	Rp0
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.323.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.249.200	Rp0	Rp2.249.200	Rp2.249.200	Rp74.300
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.323.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.249.200	Rp0	Rp2.249.200	Rp2.249.200	Rp74.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.323.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.249.200	Rp0	Rp2.249.200	Rp2.249.200	Rp74.300
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.323.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.249.200	Rp0	Rp2.249.200	Rp2.249.200	Rp74.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.323.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.249.200	Rp0	Rp2.249.200	Rp2.249.200	Rp74.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp517.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp515.000	Rp0	Rp515.000	Rp515.000	Rp2.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp303.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp259.200	Rp0	Rp259.200	Rp259.200	Rp44.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.502.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.475.000	Rp0	Rp1.475.000	Rp1.475.000	Rp27.400
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.142.384.786	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.632.298.785	Rp1.510.086.001
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.142.384.786	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.632.298.785	Rp1.510.086.001
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.142.384.786	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.632.298.785	Rp1.510.086.001
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp13.142.384.786	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.632.298.785	Rp1.510.086.001
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.573.849.667	Rp4.498.615.700	Rp349.306.664	Rp4.847.922.364	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.847.922.364	Rp725.927.303
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp3.982.384.823	Rp3.266.661.424	Rp229.321.100	Rp3.495.982.524	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.495.982.524	Rp486.402.299
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp3.982.384.823	Rp3.266.661.424	Rp229.321.100	Rp3.495.982.524	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.495.982.524	Rp486.402.299
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp367.362.114	Rp305.170.260	Rp22.003.114	Rp327.173.374	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp327.173.374	Rp40.188.740
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp367.362.114	Rp305.170.260	Rp22.003.114	Rp327.173.374	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp327.173.374	Rp40.188.740
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp218.610.000	Rp181.850.000	Rp13.330.000	Rp195.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp195.180.000	Rp23.430.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp218.610.000	Rp181.850.000	Rp13.330.000	Rp195.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp195.180.000	Rp23.430.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp227.065.000	Rp163.374.000	Rp10.540.000	Rp173.914.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.914.000	Rp53.151.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp227.065.000	Rp163.374.000	Rp10.540.000	Rp173.914.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.914.000	Rp53.151.000
	Pengembalian Belanja (STS)	Rp0	(Rp1.680.000)	(Rp0)	(Rp1.680.000)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp0)	(Rp1.680.000)	Rp1.680.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp113.095.000	Rp89.630.000	Rp6.440.000	Rp96.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.070.000	Rp17.025.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp113.095.000	Rp89.630.000	Rp6.440.000	Rp96.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.070.000	Rp17.025.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp211.347.630	Rp167.000.520	Rp12.021.720	Rp179.022.240	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp179.022.240	Rp32.325.390

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp211.347.630	Rp167.000.520	Rp12.021.720	Rp179.022.240	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp179.022.240	Rp32.325.390
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp40.338.356	Rp29.088.447	Rp971.642	Rp30.060.089	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.060.089	Rp10.278.267
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp40.338.356	Rp29.088.447	Rp971.642	Rp30.060.089	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.060.089	Rp10.278.267
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp81.697	Rp38.266	Rp2.749	Rp41.015	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.015	Rp40.682
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp81.697	Rp38.266	Rp2.749	Rp41.015	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.015	Rp40.682
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	Rp368.482.906	Rp269.481.211	Rp52.474.865	Rp321.956.076	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.956.076	Rp46.526.830
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp368.482.906	Rp269.481.211	Rp52.474.865	Rp321.956.076	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp321.956.076	Rp46.526.830
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp8.101.249	Rp6.580.348	Rp550.365	Rp7.130.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.130.713	Rp970.536
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp8.101.249	Rp6.580.348	Rp550.365	Rp7.130.713	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.130.713	Rp970.536
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	Rp24.340.517	Rp19.741.224	Rp1.651.109	Rp21.392.333	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.392.333	Rp2.948.184
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp24.340.517	Rp19.741.224	Rp1.651.109	Rp21.392.333	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.392.333	Rp2.948.184
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp12.640.375	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.640.375
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp12.640.375	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.640.375
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp7.481.320.119	Rp6.257.815.201	Rp486.486.220	Rp6.744.301.421	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.744.301.421	Rp737.018.698
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp4.659.757.540	Rp3.840.843.690	Rp305.594.105	Rp4.146.437.795	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.146.437.795	Rp513.319.745
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp4.659.757.540	Rp3.840.843.690	Rp305.594.105	Rp4.146.437.795	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.146.437.795	Rp513.319.745
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp663.211.695	Rp587.950.262	Rp51.343.750	Rp639.294.012	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp639.294.012	Rp23.917.683
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp663.211.695	Rp587.950.262	Rp51.343.750	Rp639.294.012	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp639.294.012	Rp23.917.683
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp2.158.350.884	Rp1.829.021.249	Rp129.548.365	Rp1.958.569.614	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.958.569.614	Rp199.781.270
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp2.158.350.884	Rp1.829.021.249	Rp129.548.365	Rp1.958.569.614	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.958.569.614	Rp199.781.270
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp87.215.000	Rp40.075.000	Rp0	Rp40.075.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.075.000	Rp47.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp87.215.000	Rp40.075.000	Rp0	Rp40.075.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.075.000	Rp47.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp87.215.000	Rp40.075.000	Rp0	Rp40.075.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.075.000	Rp47.140.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp196.596.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.133.000	Rp25.000.000	Rp44.133.000	Rp89.433.186	Rp2.600.000	Rp92.033.186	Rp136.166.186	Rp60.430.314
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp9.999.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.895.000	Rp0	Rp9.895.000	Rp9.895.000	Rp104.100
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp44.298.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp22.902.276	Rp0	Rp22.902.276	Rp36.622.776	Rp7.675.924
5.1	BELANJA OPERASI	Rp44.298.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp22.902.276	Rp0	Rp22.902.276	Rp36.622.776	Rp7.675.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp44.298.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp22.902.276	Rp0	Rp22.902.276	Rp36.622.776	Rp7.675.924
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp44.298.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp22.902.276	Rp0	Rp22.902.276	Rp36.622.776	Rp7.675.924
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp44.298.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp22.902.276	Rp0	Rp22.902.276	Rp36.622.776	Rp7.675.924
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp10.409.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.009.576	Rp0	Rp8.009.576	Rp8.009.576	Rp2.399.624
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp10.317.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.092.700	Rp0	Rp9.092.700	Rp9.092.700	Rp1.225.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp23.571.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.720.500	Rp0	Rp13.720.500	Rp5.800.000	Rp0	Rp5.800.000	Rp19.520.500	Rp4.051.100
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp55.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp26.800.000	Rp2.600.000	Rp29.400.000	Rp54.400.000	Rp600.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp12.187.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.776.250	Rp0	Rp7.776.250	Rp7.776.250	Rp4.411.450
2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.548.750	Rp0	Rp1.548.750	Rp1.548.750	Rp2.951.250
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.548.750	Rp0	Rp1.548.750	Rp1.548.750	Rp2.951.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.548.750	Rp0	Rp1.548.750	Rp1.548.750	Rp2.951.250
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.548.750	Rp0	Rp1.548.750	Rp1.548.750	Rp2.951.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.548.750	Rp0	Rp1.548.750	Rp1.548.750	Rp2.951.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.032.500	Rp0	Rp1.032.500	Rp1.032.500	Rp1.967.500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp983.750
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp70.611.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp20.510.910	Rp0	Rp20.510.910	Rp25.923.410	Rp44.687.590
5.1	BELANJA OPERASI	Rp70.611.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp20.510.910	Rp0	Rp20.510.910	Rp25.923.410	Rp44.687.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp70.611.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp20.510.910	Rp0	Rp20.510.910	Rp25.923.410	Rp44.687.590
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.625.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.625.000	Rp0	Rp14.625.000	Rp13.053.750	Rp0	Rp13.053.750	Rp13.053.750	Rp1.571.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.625.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.625.000	Rp0	Rp14.625.000	Rp13.053.750	Rp0	Rp13.053.750	Rp13.053.750	Rp1.571.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.625.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.625.000	Rp0	Rp14.625.000	Rp13.053.750	Rp0	Rp13.053.750	Rp13.053.750	Rp1.571.250
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp55.986.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp7.457.160	Rp0	Rp7.457.160	Rp12.869.660	Rp43.116.340
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp55.986.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp7.457.160	Rp0	Rp7.457.160	Rp12.869.660	Rp43.116.340
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp55.986.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.412.500	Rp0	Rp5.412.500	Rp7.457.160	Rp0	Rp7.457.160	Rp12.869.660	Rp43.116.340
2.17.01.1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
2.17.01.1.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp56.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp48.500.000	Rp8.440.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp12.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.600.000	Rp0	Rp11.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.600.000	Rp470.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp12.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.070.000	Rp0	Rp12.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.070.000	Rp470.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp12.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.600.000	Rp0	Rp11.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.600.000	Rp470.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp44.870.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.900.000	Rp0	Rp36.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.900.000	Rp7.970.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp37.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp7.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp37.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp7.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp7.370.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.900.000	Rp0	Rp6.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.900.000	Rp470.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp7.370.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.900.000	Rp0	Rp6.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.900.000	Rp470.000
2.17.01.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.154.138.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp786.789.500	Rp152.357.900	Rp939.147.400	Rp175.516.501	Rp18.001.258	Rp193.517.759	Rp1.132.665.159	Rp21.473.241
2.17.01.1.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.991.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.810.000	Rp0	Rp1.810.000	Rp1.810.000	Rp181.000
2.17.01.1.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp213.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.706.501	Rp18.001.258	Rp191.707.759	Rp191.707.759	Rp21.292.241
5.1	BELANJA OPERASI	Rp213.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.706.501	Rp18.001.258	Rp191.707.759	Rp191.707.759	Rp21.292.241
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp213.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.706.501	Rp18.001.258	Rp191.707.759	Rp191.707.759	Rp21.292.241
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp213.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.706.501	Rp18.001.258	Rp191.707.759	Rp191.707.759	Rp21.292.241
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp213.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.706.501	Rp18.001.258	Rp191.707.759	Rp191.707.759	Rp21.292.241
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp12.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.377.228	Rp667.667	Rp8.044.895	Rp3.955.105	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.599.700	Rp2.519.000	Rp26.118.700	Rp3.881.300	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp171.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp142.729.573	Rp14.814.591	Rp157.544.164	Rp13.455.836	
2.17.01.1.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp786.789.500	Rp152.357.900	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.147.400	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp786.789.500	Rp152.357.900	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.147.400	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp786.789.500	Rp152.357.900	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.147.400	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp786.789.500	Rp152.357.900	Rp939.147.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp939.147.400	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp867.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727.075.000	Rp140.415.000	Rp867.490.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp867.490.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp520.494.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp436.245.000	Rp84.249.000	Rp520.494.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp520.494.000	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp116.332.000	Rp22.466.400	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.798.400	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp208.197.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp174.498.000	Rp33.699.600	Rp208.197.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp208.197.600	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp71.657.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp59.714.500	Rp11.942.900	Rp71.657.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp71.657.400	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp35.935.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.946.500	Rp5.989.300	Rp35.935.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.935.800	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp2.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.685.000	Rp337.000	Rp2.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.022.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp33.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.083.000	Rp5.616.600	Rp33.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.699.600	Rp0
2.17.01.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp971.938.956	Rp0	Rp0	Rp0	Rp618.704.980	Rp86.134.476	Rp704.839.456	Rp79.496.300	Rp7.579.000	Rp87.075.300	Rp791.914.756	Rp180.024.200
2.17.01.1.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp750.088.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp492.818.660	Rp61.757.212	Rp554.575.872	Rp55.903.700	Rp540.000	Rp56.443.700	Rp611.019.572	Rp139.069.300
5.1	BELANJA OPERASI	Rp750.088.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp492.818.660	Rp61.757.212	Rp554.575.872	Rp55.903.700	Rp540.000	Rp56.443.700	Rp611.019.572	Rp139.069.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp750.088.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp492.818.660	Rp61.757.212	Rp554.575.872	Rp55.903.700	Rp540.000	Rp56.443.700	Rp611.019.572	Rp139.069.300
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp245.054.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp36.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp245.054.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp36.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp245.054.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp245.017.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp245.017.600	Rp36.800
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp308.234.472	Rp0	Rp0	Rp0	Rp247.801.060	Rp48.160.212	Rp295.961.272	Rp8.848.700	Rp0	Rp8.848.700	Rp304.809.972	Rp3.424.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp288.170.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp231.081.000	Rp275.897.200	Rp48.816.200	Rp8.848.700	Rp0	Rp8.848.700	Rp284.745.900	Rp3.424.500
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.500.000	Rp5.500.000	Rp33.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp242.897.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp203.581.000	Rp39.316.200	Rp242.897.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp242.897.200	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp12.273.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.848.700	Rp0	Rp8.848.700	Rp8.848.700	Rp3.424.500
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp20.064.072	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.720.060	Rp3.344.012	Rp20.064.072	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.064.072	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp10.062.024	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.385.020	Rp1.677.004	Rp10.062.024	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.062.024	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp566.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp471.800	Rp94.360	Rp566.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp566.160	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp9.435.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.863.240	Rp1.572.648	Rp9.435.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.435.888	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp196.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp47.055.000	Rp540.000	Rp47.595.000	Rp61.192.000	Rp135.608.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp196.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp47.055.000	Rp540.000	Rp47.595.000	Rp61.192.000	Rp135.608.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp196.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp13.597.000	Rp47.055.000	Rp540.000	Rp47.595.000	Rp61.192.000	Rp135.608.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.540.000	Rp0	Rp9.540.000	Rp9.540.000	Rp40.460.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.540.000	Rp0	Rp9.540.000	Rp9.540.000	Rp40.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.540.000	Rp0	Rp9.540.000	Rp9.540.000	Rp40.460.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.540.000	Rp0	Rp9.540.000	Rp9.540.000	Rp40.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.540.000	Rp0	Rp9.540.000	Rp9.540.000	Rp40.460.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp25.010.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp22.010.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp15.330.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.500.000	Rp0	Rp4.500.000	Rp4.500.000	Rp10.830.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp9.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp7.620.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp171.850.084	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.886.320	Rp24.377.264	Rp150.263.584	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp171.355.184	Rp494.900
5.1	BELANJA OPERASI	Rp171.850.084	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.886.320	Rp24.377.264	Rp150.263.584	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp171.355.184	Rp494.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp171.850.084	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.886.320	Rp24.377.264	Rp150.263.584	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp171.355.184	Rp494.900
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.586.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp21.091.600	Rp494.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.586.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp21.091.600	Rp494.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp21.586.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.052.600	Rp7.039.000	Rp21.091.600	Rp21.091.600	Rp494.900
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.263.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.886.320	Rp24.377.264	Rp150.263.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.263.584	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp116.332.000	Rp22.466.400	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.798.400	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp116.332.000	Rp22.466.400	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.798.400	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.554.320	Rp1.910.864	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.465.184	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.791.440	Rp958.288	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.749.728	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp269.600	Rp53.920	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp323.520	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.493.280	Rp898.656	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.391.936	Rp0
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp259.249.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.822.095	Rp30.471.580	Rp217.293.675	Rp25.004.150	Rp0	Rp25.004.150	Rp242.297.825	Rp16.951.555
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp20.636.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.107.250	Rp0	Rp12.107.250	Rp12.107.250	Rp8.528.750
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp20.636.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.107.250	Rp0	Rp12.107.250	Rp12.107.250	Rp8.528.750
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.636.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.107.250	Rp0	Rp12.107.250	Rp12.107.250	Rp8.528.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.636.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.107.250	Rp0	Rp12.107.250	Rp12.107.250	Rp8.528.750
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.046.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.277.250	Rp0	Rp1.277.250	Rp1.277.250	Rp2.768.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.046.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.277.250	Rp0	Rp1.277.250	Rp1.277.250	Rp2.768.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.506.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.001.250	Rp0	Rp1.001.250	Rp1.001.250	Rp504.750
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp290.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp276.000	Rp0	Rp276.000	Rp276.000	Rp14.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp16.590.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.830.000	Rp0	Rp10.830.000	Rp10.830.000	Rp5.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp16.590.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.830.000	Rp0	Rp10.830.000	Rp10.830.000	Rp5.760.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.760.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.830.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.830.000	Rp0	Rp10.830.000	Rp10.830.000	Rp0
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp238.613.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.822.095	Rp30.471.580	Rp217.293.675	Rp12.896.900	Rp0	Rp12.896.900	Rp230.190.575	Rp8.422.805
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp238.613.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.822.095	Rp30.471.580	Rp217.293.675	Rp12.896.900	Rp0	Rp12.896.900	Rp230.190.575	Rp8.422.805

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp238.613.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp186.822.095	Rp30.471.580	Rp217.293.675	Rp12.896.900	Rp0	Rp12.896.900	Rp230.190.575	Rp8.422.805
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp213.613.380	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.822.095	Rp30.471.580	Rp192.293.675	Rp12.896.900	Rp0	Rp12.896.900	Rp205.190.575	Rp8.422.805
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.997.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.997.900	Rp0	Rp0	Rp3.776.900	Rp0	Rp3.776.900	Rp5.221.000	Rp5.221.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.997.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.776.900	Rp0	Rp3.776.900	Rp3.776.900	Rp5.221.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.595.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp943.400	Rp0	Rp943.400	Rp943.400	Rp652.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp652.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp621.000	Rp0	Rp621.000	Rp621.000	Rp31.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.212.500	Rp0	Rp2.212.500	Rp2.212.500	Rp4.537.500
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp187.829.480	Rp0	Rp0	Rp0	Rp157.357.900	Rp30.471.580	Rp187.829.480	Rp0	Rp0	Rp0	Rp187.829.480	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp173.498.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.415.000	Rp28.083.000	Rp173.498.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.498.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp173.498.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp145.415.000	Rp28.083.000	Rp173.498.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp173.498.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp14.331.480	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.942.900	Rp2.388.580	Rp14.331.480	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.331.480	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp7.187.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.989.300	Rp1.197.860	Rp7.187.160	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.187.160	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp404.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp337.000	Rp67.400	Rp404.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp404.400	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp6.739.920	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.616.600	Rp1.123.320	Rp6.739.920	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.739.920	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp16.786.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.464.195	Rp0	Rp4.464.195	Rp9.120.000	Rp0	Rp9.120.000	Rp13.584.195	Rp3.201.805
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp16.786.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.464.195	Rp0	Rp4.464.195	Rp9.120.000	Rp0	Rp9.120.000	Rp13.584.195	Rp3.201.805
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.666.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.464.195	Rp0	Rp4.464.195	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.464.195	Rp3.201.805
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.120.000	Rp0	Rp9.120.000	Rp9.120.000	Rp0
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp46.919.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.683.900	Rp0	Rp23.683.900	Rp23.683.900	Rp23.235.900
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp17.119.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.299.750	Rp0	Rp11.299.750	Rp11.299.750	Rp5.820.050
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Rp17.119.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.299.750	Rp0	Rp11.299.750	Rp11.299.750	Rp5.820.050
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.119.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.299.750	Rp0	Rp11.299.750	Rp11.299.750	Rp5.820.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.119.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.299.750	Rp0	Rp11.299.750	Rp11.299.750	Rp5.820.050
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp719.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp659.750	Rp0	Rp659.750	Rp659.750	Rp60.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp719.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp659.750	Rp0	Rp659.750	Rp659.750	Rp60.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp105.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.600	Rp0	Rp61.600	Rp61.600	Rp44.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp481.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp469.400	Rp0	Rp469.400	Rp469.400	Rp12.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp132.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp128.750	Rp0	Rp128.750	Rp128.750	Rp3.850
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp16.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.640.000	Rp0	Rp10.640.000	Rp10.640.000	Rp5.760.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp16.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.640.000	Rp0	Rp10.640.000	Rp10.640.000	Rp5.760.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.760.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp10.640.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.640.000	Rp0	Rp10.640.000	Rp10.640.000	Rp0
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp29.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.384.150	Rp0	Rp12.384.150	Rp12.384.150	Rp17.415.850
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Rp29.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.384.150	Rp0	Rp12.384.150	Rp12.384.150	Rp17.415.850
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.384.150	Rp0	Rp12.384.150	Rp12.384.150	Rp17.415.850
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.384.150	Rp0	Rp12.384.150	Rp12.384.150	Rp17.415.850
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp984.150	Rp0	Rp984.150	Rp984.150	Rp135.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp984.150	Rp0	Rp984.150	Rp984.150	Rp135.850
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp121.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.700	Rp0	Rp70.700	Rp70.700	Rp50.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp468.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp419.200	Rp0	Rp419.200	Rp419.200	Rp49.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp530.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp494.250	Rp0	Rp494.250	Rp494.250	Rp36.150
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp28.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp0	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp17.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp28.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp0	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp17.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.400.000	Rp0	Rp11.400.000	Rp11.400.000	Rp0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp118.491.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp29.704.500	Rp0	Rp29.704.500	Rp104.836.292	Rp13.655.100

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp118.491.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp29.704.500	Rp0	Rp29.704.500	Rp104.836.292	Rp13.655.100
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Rp118.491.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp29.704.500	Rp0	Rp29.704.500	Rp104.836.292	Rp13.655.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp118.491.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp29.704.500	Rp0	Rp29.704.500	Rp104.836.292	Rp13.655.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp118.491.392	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp29.704.500	Rp0	Rp29.704.500	Rp104.836.292	Rp13.655.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.799.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.584.500	Rp0	Rp1.584.500	Rp1.584.500	Rp215.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.799.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.584.500	Rp0	Rp1.584.500	Rp1.584.500	Rp215.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp105.000	Rp0	Rp105.000	Rp105.000	Rp75.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp956.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp856.500	Rp0	Rp856.500	Rp856.500	Rp100.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp663.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp623.000	Rp0	Rp623.000	Rp623.000	Rp40.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp955.432	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.732.592	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp479.144	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.874.864	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp26.960	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.760	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp449.328	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.695.968	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp41.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.120.000	Rp0	Rp28.120.000	Rp28.120.000	Rp13.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp41.560.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.120.000	Rp0	Rp28.120.000	Rp28.120.000	Rp13.440.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.440.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp28.120.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.120.000	Rp0	Rp28.120.000	Rp28.120.000	Rp0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp316.561.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp166.615.642	Rp80.471.580	Rp247.087.222	Rp50.287.245	Rp0	Rp50.287.245	Rp297.374.467	Rp19.186.713
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp316.561.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp166.615.642	Rp80.471.580	Rp247.087.222	Rp50.287.245	Rp0	Rp50.287.245	Rp297.374.467	Rp19.186.713
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp200.525.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.314.740	Rp68.282.948	Rp164.597.688	Rp23.664.495	Rp0	Rp23.664.495	Rp188.262.183	Rp12.263.705
5.1	BELANJA OPERASI	Rp200.525.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.314.740	Rp68.282.948	Rp164.597.688	Rp23.664.495	Rp0	Rp23.664.495	Rp188.262.183	Rp12.263.705
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.525.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.314.740	Rp18.282.948	Rp114.597.688	Rp23.664.495	Rp0	Rp23.664.495	Rp138.262.183	Rp12.263.705
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.728.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.084.495	Rp0	Rp8.084.495	Rp8.084.495	Rp643.705
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.728.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.084.495	Rp0	Rp8.084.495	Rp8.084.495	Rp643.705
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp992.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp861.995	Rp0	Rp861.995	Rp861.995	Rp130.605
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp718.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp699.000	Rp0	Rp699.000	Rp699.000	Rp19.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp198.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp180.000	Rp0	Rp180.000	Rp180.000	Rp18.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.119.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.688.500	Rp0	Rp3.688.500	Rp3.688.500	Rp431.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.655.000	Rp0	Rp2.655.000	Rp2.655.000	Rp45.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp114.697.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp96.314.740	Rp18.282.948	Rp114.597.688	Rp0	Rp0	Rp0	Rp114.597.688	Rp100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp106.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp89.149.000	Rp16.849.800	Rp105.998.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp105.998.800	Rp100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.900.000	Rp0	Rp1.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.900.000	Rp100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp87.249.000	Rp16.849.800	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.098.800	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp8.598.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.165.740	Rp1.433.148	Rp8.598.888	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.598.888	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.312.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.593.580	Rp718.716	Rp4.312.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.312.296	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp242.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp202.200	Rp40.440	Rp242.640	Rp0	Rp0	Rp0	Rp242.640	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp4.043.952	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.369.960	Rp673.992	Rp4.043.952	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.043.952	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp27.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.580.000	Rp0	Rp15.580.000	Rp15.580.000	Rp11.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp27.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.580.000	Rp0	Rp15.580.000	Rp15.580.000	Rp11.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp11.520.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.520.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.580.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.580.000	Rp0	Rp15.580.000	Rp15.580.000	Rp0
5.1.05	Belanja Hibah	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp116.035.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.300.902	Rp12.188.632	Rp82.489.534	Rp26.622.750	Rp0	Rp26.622.750	Rp109.112.284	Rp6.923.008
5.1	BELANJA OPERASI	Rp116.035.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.300.902	Rp12.188.632	Rp82.489.534	Rp26.622.750	Rp0	Rp26.622.750	Rp109.112.284	Rp6.923.008

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9-12)	14=(3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp116.035.292	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.300.902	Rp12.188.632	Rp82.489.534	Rp26.622.750	Rp0	Rp26.622.750	Rp109.112.284	Rp6.923.008
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.327.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.332.750	Rp0	Rp9.332.750	Rp9.332.750	Rp994.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.327.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.332.750	Rp0	Rp9.332.750	Rp9.332.750	Rp994.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp385.000	Rp0	Rp385.000	Rp385.000	Rp275.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp942.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp897.000	Rp0	Rp897.000	Rp897.000	Rp45.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp332.000	Rp0	Rp332.000	Rp332.000	Rp68.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.325.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.718.750	Rp0	Rp7.718.750	Rp7.718.750	Rp606.250
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp955.432	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp5.732.592	Rp5.732.592	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp479.144	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp2.874.864	Rp2.874.864	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp26.960	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp161.760	Rp161.760	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp449.328	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp2.695.968	Rp2.695.968	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp30.576.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.357.742	Rp0	Rp7.357.742	Rp17.290.000	Rp0	Rp17.290.000	Rp24.647.742	Rp5.928.258
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp30.576.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.357.742	Rp0	Rp7.357.742	Rp17.290.000	Rp0	Rp17.290.000	Rp24.647.742	Rp5.928.258
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp13.286.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.357.742	Rp0	Rp7.357.742	Rp0	Rp0	Rp7.357.742	Rp7.357.742	Rp5.928.258
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp17.290.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.290.000	Rp0	Rp17.290.000	Rp17.290.000	Rp0
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp822.315.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp595.002.796	Rp67.348.844	Rp662.351.640	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp672.551.385	Rp149.763.975
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp822.315.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp595.002.796	Rp67.348.844	Rp662.351.640	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp672.551.385	Rp149.763.975
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp822.315.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp595.002.796	Rp67.348.844	Rp662.351.640	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp672.551.385	Rp149.763.975
5.1	BELANJA OPERASI	Rp822.315.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp595.002.796	Rp67.348.844	Rp662.351.640	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp672.551.385	Rp149.763.975
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp822.315.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp595.002.796	Rp67.348.844	Rp662.351.640	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp672.551.385	Rp149.763.975
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp138.435.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.608.470	Rp0	Rp104.608.470	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp14.808.215	Rp23.627.185
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp138.435.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.608.470	Rp0	Rp104.608.470	Rp10.199.745	Rp0	Rp10.199.745	Rp14.808.215	Rp23.627.185
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp20.462.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.617.720	Rp0	Rp13.617.720	Rp1.700.695	Rp0	Rp1.700.695	Rp15.318.415	Rp5.143.985
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp4.711.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.796.000	Rp0	Rp2.796.000	Rp1.537.800	Rp0	Rp1.537.800	Rp4.333.800	Rp377.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp150.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000	Rp0	Rp150.000	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp6.691.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.158.750	Rp0	Rp4.158.750	Rp2.170.000	Rp0	Rp2.170.000	Rp6.328.750	Rp362.650
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp86.980.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.748.000	Rp0	Rp81.748.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp81.748.000	Rp5.232.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp14.265.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.288.000	Rp0	Rp2.288.000	Rp4.641.250	Rp0	Rp4.641.250	Rp6.929.250	Rp7.335.750
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp3.375.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp521.319.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp353.574.326	Rp67.348.844	Rp420.923.170	Rp0	Rp0	Rp0	Rp420.923.170	Rp100.396.790
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp428.496.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp330.405.100	Rp63.049.400	Rp393.454.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp393.454.500	Rp35.041.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp42.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.100.000	Rp0	Rp28.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.100.000	Rp14.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp346.996.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp282.405.100	Rp50.549.400	Rp332.954.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp332.954.500	Rp14.041.500
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp12.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.500.000	Rp0	Rp12.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementretan	Rp22.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.900.000	Rp0	Rp19.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.900.000	Rp2.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp28.662.960	Rp0	Rp0	Rp0	Rp23.169.226	Rp4.299.444	Rp27.468.670	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.468.670	Rp1.194.290
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp14.374.320	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.619.242	Rp2.156.148	Rp13.775.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.775.390	Rp598.930
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp808.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp653.780	Rp121.320	Rp775.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp775.100	Rp33.700
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp13.479.840	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.896.204	Rp2.021.976	Rp12.918.180	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.918.180	Rp561.660
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp64.161.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.161.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp63.441.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp63.441.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp720.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp720.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp143.060.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.820.000	Rp0	Rp136.820.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.820.000	Rp6.240.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp143.060.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.820.000	Rp0	Rp136.820.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.820.000	Rp6.240.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.240.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.240.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp12.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.900.000	Rp0	Rp12.900.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.900.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp123.920.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.920.000	Rp0	Rp123.920.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp123.920.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp19.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.500.000
UPDT Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Rp4.376.912.578	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.826.183.040	Rp341.427.644	Rp4.167.610.684	Rp4.635.227	Rp3.129.257	Rp47.764.484	Rp4.215.375.168	Rp161.537.410
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp414.194.572	Rp0	Rp0	Rp0	Rp278.031.860	Rp42.660.212	Rp320.692.072	Rp31.222.227	Rp1.739.057	Rp42.961.284	Rp353.653.356	Rp60.541.216
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp4.077.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.676.000	Rp0	Rp3.676.000	Rp3.676.000	Rp401.900
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
5.1	BELANJA OPERASI	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp666.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661.000	Rp0	Rp661.000	Rp661.000	Rp5.400
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.725.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.479.000	Rp0	Rp2.479.000	Rp2.479.000	Rp246.900
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.725.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.479.000	Rp0	Rp2.479.000	Rp2.479.000	Rp246.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.725.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.479.000	Rp0	Rp2.479.000	Rp2.479.000	Rp246.900
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.725.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.479.000	Rp0	Rp2.479.000	Rp2.479.000	Rp246.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.725.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.479.000	Rp0	Rp2.479.000	Rp2.479.000	Rp246.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp896.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp719.000	Rp0	Rp719.000	Rp719.000	Rp177.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp604.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp560.000	Rp0	Rp560.000	Rp560.000	Rp44.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.225.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp25.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
5.1	BELANJA OPERASI	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp685.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp536.000	Rp0	Rp536.000	Rp536.000	Rp149.600
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp236.264.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.686.320	Rp24.377.264	Rp175.063.584	Rp25.013.727	Rp1.739.057	Rp26.752.784	Rp201.816.368	Rp34.448.216
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp1.001.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp910.000	Rp0	Rp910.000	Rp910.000	Rp91.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.203.727	Rp1.139.057	Rp14.342.784	Rp14.342.784	Rp34.157.216
5.1	BELANJA OPERASI	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.203.727	Rp1.139.057	Rp14.342.784	Rp14.342.784	Rp34.157.216
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.203.727	Rp1.139.057	Rp14.342.784	Rp14.342.784	Rp34.157.216
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.203.727	Rp1.139.057	Rp14.342.784	Rp14.342.784	Rp34.157.216
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.203.727	Rp1.139.057	Rp14.342.784	Rp14.342.784	Rp34.157.216
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp8.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.034.227	Rp457.657	Rp5.491.884	Rp5.491.884	Rp2.508.116
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp933.900	Rp84.900	Rp1.018.800	Rp1.018.800	Rp1.481.200
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.235.600	Rp596.500	Rp7.832.100	Rp7.832.100	Rp30.167.900
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp186.763.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.686.320	Rp24.377.264	Rp175.063.584	Rp10.900.000	Rp600.000	Rp11.500.000	Rp186.563.584	Rp200.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp186.763.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.686.320	Rp24.377.264	Rp175.063.584	Rp10.900.000	Rp600.000	Rp11.500.000	Rp186.563.584	Rp200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp186.763.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.686.320	Rp24.377.264	Rp175.063.584	Rp10.900.000	Rp600.000	Rp11.500.000	Rp186.563.584	Rp200.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp36.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.800.000	Rp0	Rp24.800.000	Rp10.900.000	Rp600.000	Rp11.500.000	Rp36.300.000	Rp200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp36.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.800.000	Rp0	Rp24.800.000	Rp10.900.000	Rp600.000	Rp11.500.000	Rp36.300.000	Rp200.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	Rp4.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.000.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp32.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.800.000	Rp0	Rp24.800.000	Rp6.900.000	Rp600.000	Rp7.500.000	Rp32.300.000	Rp200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.263.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp125.886.320	Rp24.377.264	Rp150.263.584	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.263.584	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp116.332.000	Rp22.466.400	Rp138.798.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp138.798.400	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.083.000	Rp5.616.600	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.699.600	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp87.249.000	Rp16.849.800	Rp104.098.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.098.800	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.554.320	Rp1.910.864	Rp11.465.184	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.465.184	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.791.440	Rp958.288	Rp5.749.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.749.728	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp269.600	Rp53.920	Rp323.520	Rp0	Rp0	Rp0	Rp323.520	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.493.280	Rp898.656	Rp5.391.936	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.391.936	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d.(4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp173.852.088	Rp0	Rp0	Rp0	Rp127.345.540	Rp18.282.948	Rp145.628.488	Rp2.532.500	Rp0	Rp2.532.500	Rp148.160.988	Rp25.691.100
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp95.870.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.402.380	Rp6.094.316	Rp70.496.696	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp71.419.196	Rp24.451.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp95.870.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.402.380	Rp6.094.316	Rp70.496.696	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp71.419.196	Rp24.451.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp95.870.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.402.380	Rp6.094.316	Rp70.496.696	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp71.419.196	Rp24.451.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp17.104.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp3.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp17.104.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp3.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp17.104.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp17.100.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp17.100.800	Rp3.600
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp38.765.896	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.471.580	Rp6.094.316	Rp37.565.896	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp38.488.396	Rp277.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp35.899.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.083.000	Rp5.616.600	Rp34.699.600	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp35.622.100	Rp277.500
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.083.000	Rp5.616.600	Rp34.699.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.699.600	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp1.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp922.500	Rp0	Rp922.500	Rp277.500	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp2.866.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.388.580	Rp477.716	Rp2.866.296	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.866.296	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.437.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.197.860	Rp239.572	Rp1.437.432	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.437.432	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp80.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.400	Rp13.480	Rp80.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.880	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp1.347.984	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.123.320	Rp224.664	Rp1.347.984	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.347.984	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp24.170.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp24.170.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp40.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp15.830.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.830.000	Rp24.170.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp1.240.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp1.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp1.240.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp1.240.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp2.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.610.000	Rp0	Rp1.610.000	Rp1.610.000	Rp1.240.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp610.000	Rp0	Rp610.000	Rp610.000	Rp90.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp1.460.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp650.000	Rp0	Rp650.000	Rp650.000	Rp810.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp690.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp350.000	Rp0	Rp350.000	Rp350.000	Rp340.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.943.160	Rp12.188.632	Rp75.131.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.131.792	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp58.166.000	Rp11.233.200	Rp69.399.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp69.399.200	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp955.432	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.732.592	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp479.144	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.874.864	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp26.960	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.760	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp449.328	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.695.968	Rp0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp3.962.718.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.548.151.180	Rp298.767.432	Rp3.846.918.612	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp3.861.721.812	Rp100.996.194
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp3.962.718.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.548.151.180	Rp298.767.432	Rp3.846.918.612	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp3.861.721.812	Rp100.996.194
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp3.962.718.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.548.151.180	Rp298.767.432	Rp3.846.918.612	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp3.861.721.812	Rp100.996.194
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.962.718.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.548.151.180	Rp298.767.432	Rp3.846.918.612	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp3.861.721.812	Rp100.996.194
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.962.718.006	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.548.151.180	Rp298.767.432	Rp3.846.918.612	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp3.861.721.812	Rp100.996.194
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp361.537.568	Rp0	Rp0	Rp0	Rp330.750.020	Rp5.310.000	Rp336.060.020	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp350.863.220	Rp10.674.348
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp361.537.568	Rp0	Rp0	Rp0	Rp330.750.020	Rp5.310.000	Rp336.060.020	Rp13.413.000	Rp1.390.200	Rp14.803.200	Rp350.863.220	Rp10.674.348
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp24.570.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.565.100	Rp0	Rp24.565.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp24.565.100	Rp5.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp27.586.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.762.820	Rp0	Rp15.762.820	Rp6.400.000	Rp1.390.200	Rp7.790.200	Rp23.553.020	Rp4.033.030
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp13.320.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.600.000	Rp0	Rp12.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.600.000	Rp720.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.510.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.510.000	Rp0	Rp2.510.000	Rp2.510.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp14.155.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.425.000	Rp0	Rp13.425.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.425.000	Rp730.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp945.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp925.000	Rp0	Rp925.000	Rp925.000	Rp20.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. (10+11)		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	Rp3.727.450	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.320.100	Rp0	Rp3.320.100	Rp378.000	Rp0	Rp378.000	Rp3.698.100	Rp29.350
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Atat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp175.902.868	Rp0	Rp0	Rp0	Rp174.741.000	Rp0	Rp174.741.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp174.741.000	Rp1.161.868
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp23.940.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.859.000	Rp5.310.000	Rp18.169.000	Rp3.200.000	Rp0	Rp3.200.000	Rp21.369.000	Rp2.571.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp74.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp73.477.000	Rp0	Rp73.477.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp73.477.000	Rp1.403.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.517.776.642	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.213.093.160	Rp262.588.632	Rp2.475.681.792	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.475.681.792	Rp42.094.850
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.512.044.050	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.208.316.000	Rp261.633.200	Rp2.469.949.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.469.949.200	Rp42.094.850
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp675.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp639.400.000	Rp0	Rp639.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp639.400.000	Rp36.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp1.604.199.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.337.166.000	Rp261.633.200	Rp1.598.799.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.598.799.200	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp169.344.850	Rp0	Rp0	Rp0	Rp169.000.000	Rp0	Rp169.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp169.000.000	Rp344.850
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp60.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp59.750.000	Rp0	Rp59.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp59.750.000	Rp250.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.777.160	Rp955.432	Rp5.732.592	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.732.592	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.395.720	Rp479.144	Rp2.874.864	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.874.864	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.800	Rp26.960	Rp161.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp161.760	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.246.640	Rp449.328	Rp2.695.968	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.695.968	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.083.403.796	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.004.308.000	Rp30.868.800	Rp1.035.176.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.035.176.800	Rp48.226.996
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.083.403.796	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.004.308.000	Rp30.868.800	Rp1.035.176.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.035.176.800	Rp48.226.996
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp29.934.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.934.000	Rp0	Rp29.934.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.934.000	Rp29.934.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp1.053.469.796	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.004.308.000	Rp30.868.800	Rp1.035.176.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.035.176.800	Rp18.292.996
JUMLAH		Rp21.543.645.124	Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661	Rp533.422.279	Rp31.309.515	Rp564.731.794	Rp19.378.257.240	Rp2.165.387.884
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP										Rp250.000.000	Rp0	Rp250.000.000	Rp250.000.000
GU										Rp318.527.325	Rp0	Rp318.527.325	Rp318.527.325
TU										Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
LS			Rp10.798.185.901	Rp835.792.884	Rp11.633.978.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661					Rp18.815.205.446
SP2D KKPD GU										Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
- Pelimpahan SP2D:													
Pelimpahan UP										Rp250.000.000	Rp0	Rp250.000.000	Rp250.000.000
Pelimpahan GU										Rp318.527.325	Rp0	Rp318.527.325	Rp318.527.325
Pelimpahan TU										Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
- Potongan :													
1. luran Wajib Pegawai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2. Taperum			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
3. Askes			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4. Taspen			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5. Lainnya			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6. Sewa Rumah			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7. Beras (BULOG)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
8. luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp6.556.045	Rp550.365	Rp7.106.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.106.410	Rp0
9. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
10. luran Jaminan Kematian PNS			Rp19.668.278	Rp1.651.109	Rp21.319.387	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.319.387	Rp0
11. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
12. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
13. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
14. luran Wajib Pegawai 8%			Rp239.846.611	Rp20.105.938	Rp259.952.549	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp259.952.549	Rp0
15. luran Wajib Pegawai 1%			Rp33.680.059	Rp2.816.345	Rp36.496.404	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.496.404	Rp0
16. luran Jaminan Kesehatan 4%			Rp269.481.211	Rp52.474.865	Rp321.956.076	Rp82.007.971	Rp16.281.896	Rp98.289.867	Rp0	Rp0	Rp0	Rp420.245.943	Rp0
17. luran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp24.303	Rp0	Rp24.303	Rp4.834.824	Rp916.640	Rp5.751.464	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.775.767	Rp0
18. luran Jaminan Kematian			Rp72.946	Rp0	Rp72.946	Rp76.174.576	Rp15.277.152	Rp91.451.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp91.524.674	Rp0
19. Zakat			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
20. BPJS Kesehatan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.078.074	Rp0	Rp1.078.074	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.078.074	Rp0
21. BPJS Ketenagakerjaan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
22. Jaminan Hari Tua			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
23. Infak			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
- Pajak :													
1. PPH 21			Rp586.055.973	Rp43.019.111	Rp629.075.084	Rp39.980.500	Rp1.575.000	Rp41.555.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp670.630.584	Rp0
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.746.355	Rp375.000	Rp6.121.355	Rp1.017.052	Rp95.121	Rp1.112.173	Rp7.233.528	Rp0
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.573.232	Rp106.200	Rp10.679.432	Rp714.998	Rp10.800	Rp725.798	Rp11.405.230	Rp0
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp89.026.852	Rp0	Rp89.026.852	Rp8.118.235	Rp697.559	Rp8.815.794	Rp97.842.646	Rp0
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah Penerimaan (SP2D Bruto) :			Rp10.798.185.901	Rp835.792.884	Rp11.633.978.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661	Rp568.527.325	Rp0	Rp568.527.325	Rp19.383.732.771	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3-13)
Pengeluaran :													
- SPJ :													
UP/GU									Rp533.422.279	Rp31.309.515	Rp564.731.794	Rp564.731.794	
TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
LS			Rp10.798.185.901	Rp835.792.884	Rp11.633.978.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661				Rp18.815.205.446	
KKPD GU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
- Potongan :													
1. Iuran Wajib Pegawai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
2. Taperum			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
3. Askes			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4. Taspen			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5. Lainnya			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6. Sewa Rumah			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7. Beras (BULOG)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp6.556.045	Rp550.365	Rp7.106.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.106.410	
9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
10. Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp19.668.278	Rp1.651.109	Rp21.319.387	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.319.387	
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
14. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp239.846.611	Rp20.105.938	Rp259.952.549	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp259.952.549	
15. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp33.680.059	Rp2.816.345	Rp36.496.404	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.496.404	
16. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp269.481.211	Rp52.474.865	Rp321.956.076	Rp82.007.971	Rp16.281.896	Rp98.289.867	Rp0	Rp0	Rp0	Rp420.245.943	
17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp24.303	Rp0	Rp24.303	Rp4.834.824	Rp916.640	Rp5.751.464	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.775.767	
18. Iuran Jaminan Kematian			Rp72.946	Rp0	Rp72.946	Rp76.174.576	Rp15.277.152	Rp91.451.728	Rp0	Rp0	Rp0	Rp91.524.674	
19. Zakat			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
20. BPJS Kesehatan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.078.074	Rp0	Rp1.078.074	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.078.074	
21. BPJS Ketenagakerjaan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
22. Jaminan Hari Tua			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
23. Infak			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
- Pajak :													
1. PPH 21			Rp586.055.973	Rp43.019.111	Rp629.075.084	Rp39.980.500	Rp1.575.000	Rp41.555.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp670.630.584	
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.746.355	Rp375.000	Rp6.121.355	Rp1.017.052	Rp95.121	Rp1.112.173	Rp7.233.528	
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.573.232	Rp106.200	Rp10.679.432	Rp714.998	Rp10.800	Rp725.798	Rp11.405.230	
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp89.026.852	Rp0	Rp89.026.852	Rp8.118.235	Rp697.559	Rp8.815.794	Rp97.842.646	
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
SPJ (netto)													
UP/GU									Rp523.571.994	Rp30.506.035	Rp554.078.029	Rp554.078.029	
TU									Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
LS			Rp9.642.800.475	Rp715.175.151	Rp10.357.975.626	Rp6.064.214.989	Rp773.057.400	Rp6.837.272.389				Rp17.195.248.015	
Pengembalian ke Kasda (STS)													
			Rp1.680.000	Rp0	Rp1.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.795.531	Rp3.795.531	Rp5.475.531	
Jumlah Pengeluaran													
			Rp10.796.505.901	Rp835.792.884	Rp11.632.298.785	Rp6.373.637.373	Rp807.589.288	Rp7.181.226.661	Rp533.422.279	Rp35.105.046	Rp568.527.325	Rp19.382.052.771	
Saldo Kas			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp35.105.046	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0



Pengguna Anggaran,

Dr. I Wayan Ekadina, S.E., M.Si.
NIP. 197012111998031005

Bendahara Pengeluaran,

FRIDOLIN RAJA SAMUEL MANURUNG, A.Md.Ak. (Bendahara Pengeluaran)
NIP. 199908022021021001



ပိမိၵ်ႉၵူၼ်း ၵူၼ်းပိၵ်ႉၵူၼ်း ၵူၼ်း
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁၢၵ်ႉႁူၼ်း
SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၼ်းႁူၼ်း ၵူၼ်းႁူၼ်း - ၵူၼ်း (ပိၵ်ႉၵူၼ်း) ၵူၼ်းႁူၼ်း ၵူၼ်း
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR B.13.028/9940/P.BMD/BPKAD

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA 2 (DUA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Persetujuan Gubernur Bali Nomor B.00.032/51690/Setda, tanggal 15 Desember 2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan penjualan kepada masyarakat umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada 2 (dua) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2012, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali berupa Barang Inventaris kondisi rusak berat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp674.705.531,67 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen) dan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan nilai perolehan sebesar Rp151.057.375,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali di Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
 PADA 2 (DUA) OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompatabel												
1	02.10.01.02.002	7	Lap Top	2010	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	02.10.01.02.002	3	Lap Top	2012	1	13.337.500,00	13.337.500,00	13.337.500,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	02.10.01.02.002	9	Lap Top	2012	1	13.337.500,00	13.337.500,00	13.337.500,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	02.10.01.02.003	15	Note Book	2013	1	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	02.10.01.02.003	16	Note Book	2013	1	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	02.10.01.02.003	34	Note Book	2013	1	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	02.10.01.02.003	8	Note Book	2015	1	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	02.10.01.02.003	26	Note Book	2018	1	12.980.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	02.10.01.02.003	31	Note Book	2018	1	18.690.166,67	18.690.166,67	18.690.166,67	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	02.10.01.02.001	137	P.C Unit	2008	1	19.450.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	02.10.01.02.001	3	P.C Unit	2009	1	11.820.143,00	11.820.143,00	11.820.143,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	02.10.01.02.001	11,13&15	P.C Unit	2011	3	10.637.000,00	31.911.000,00	31.911.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	02.10.01.02.001	4	P.C Unit	2009	1	11.820.143,00	11.820.143,00	11.820.143,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	02.10.01.02.001	38 s/d 40	P.C Unit	2011	3	10.637.000,00	31.911.000,00	31.911.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	02.10.01.02.001	55	P.C Unit	2016	1	14.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	02.10.01.02.001	99	P.C Unit	2018	1	13.550.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	02.10.02.03.003	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2002	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	02.10.02.03.003	21 s/d 23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2005	3	4.510.000,00	13.530.000,00	13.530.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	02.10.02.03.003	37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	2.180.800,00	2.180.800,00	2.180.800,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	02.10.02.03.003	38	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	02.10.02.03.003	39	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	02.10.02.03.003	13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	02.10.02.03.003	20,24,25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	3	15.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	02.10.02.03.003	40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	02.10.02.03.003	42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
26	02.10.02.03.003	11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	02.10.02.03.003	28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	4.477.500,00	4.477.500,00	4.477.500,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	02.10.02.03.003	45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	02.10.02.03.003	33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	02.10.02.03.003	48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	1	1.598.284,00	1.598.284,00	1.598.284,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
31	02.10.02.03.003	62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	4.604.123,00	4.604.123,00	4.604.123,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
32	02.10.02.03.003	64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	2.885.850,00	2.885.850,00	2.885.850,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
33	02.10.02.03.003	68 & 70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	2	7.649.000,00	15.298.000,00	15.298.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
34	02.05.01.04.005	15	Filing Cabinet Besi	1976	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
35	02.05.01.04.005	16	Filing Cabinet Besi	1976	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
36	02.05.01.04.005	2	Filing Cabinet Besi	1980	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
37	02.10.02.03.002	1	Monitor	2010	1	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
38	02.10.02.03.002	2	Monitor	2010	1	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
39	02.10.02.03.002	3 & 4	Monitor	2011	2	2.150.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
40	02.10.02.03.002	5 & 6	Monitor	2012	2	2.416.250,00	4.832.500,00	4.832.500,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	02.10.02.03.002	7 & 8	Monitor	2013	2	1.232.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
42	02.10.02.03.002	9 s/d 11	Monitor	2014	3	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
43	02.05.01.05.023	1	Overhead Projector	2004	1	46.970.000,00	46.970.000,00	46.970.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
44	02.05.01.05.023	3	Overhead Projector	2012	1	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
45	02.05.01.05.023	4	Overhead Projector	2014	1	22.687.500,00	22.687.500,00	22.687.500,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
46	02.03.03.09.018	1	Alat ukur lain-lain lainnya (dst) (GPS)	2012	1	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
47	02.05.01.04.002	9 s/d 11	Lemari Kayu	1999	3	2.900.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
48	02.05.01.05.005	9	White Board	1996	1	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
49	02.05.02.06.018	1	Unit Power Supply	1996	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
50	02.05.02.06.039	4	Mimbar/Podium	1997	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
51	02.05.02.06.039	1 & 2	Mimbar/Podium	2007	2	12.650.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
52	02.05.02.06.039	3	Mimbar/Podium	2015	1	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
53	02.06.01.01.048	1 & 2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	2	575.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
54	02.05.02.06.038	2 & 3	Dispenser	2007	2	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
55	02.05.02.01.031	10	Kursi Tamu	1977	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
56	02.05.01.01.002	1 & 2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1991	2	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
57	02.10.02.03.004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Fuji Xerox 451 ON	2011	1	20.350.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	0	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
58	1.3.2.6.1.1.48	59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	1	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
59	1.3.2.6.1.1.49	81	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2016	1	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.250,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
60	1.3.2.6.1.1.50	82	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2016	1	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.250,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
61	1.3.2.6.1.1.51	83	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2016	1	1.680.250,00	1.680.250,00	1.680.250,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
62	1.3.2.5.3.3.8	1	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2011	1	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
63	1.3.2.5.3.3.8	2	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2011	1	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	1.3.2.5.2.6.77	47	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2016	1	4.235.000,00	4.235.000,00	3.882.083,00	352.917,00	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
65	1.3.2.5.2.1.32	97	Kursi Putar	2010	1	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
66	1.3.2.5.2.1.32	120	Kursi Putar	2016	1	697.500,00	697.500,00	697.500,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
67	1.3.2.5.2.1.31	32	Kursi Tamu	2018	1	790.000,00	790.000,00	645.166,00	144.834,00	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
68	1.3.2.10.1.2.3	17	Note Book	2013	1	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
69	1.3.2.10.1.2.3	27	Note Book	2016	1	14.985.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
70	1.3.2.10.1.2.3	29	Note Book	2016	1	14.985.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	0	UPTD. PBMD	Rusak Berat	
Jumlah a					90	541.056.009,67	661.596.259,67	661.098.508,67	497.751,00			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	1.3.2.05.02.01.004	80 s/d 88	Kursi Kayu	1980	9	53.809,00	484.281,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.02.01.014	03	Meja Resepsionis	1979	1	375.000,00	375.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.02.01.002	36 s/d 43 & 93 s/d 98	Meja Kerja Kayu	1978	14	300.000,00	4.200.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.05.02.01.032	15 s/d 17 & 35 s/d 38	Kursi Putar	1994	7	400.000,00	2.800.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.05.02.01.030	11 s/d 17	Kursi Rapat	1989	7	250.000,00	1.750.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.05.02.01.039	22 s/d 38	Meja Komputer	1996	17	58.823,00	999.991,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.05.02.01.039	39 s/d 43	Meja Komputer	1997	5	100.000,00	500.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.05.02.01.039	50 & 52	Meja Komputer	2000	2	250.000,00	500.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.02.02.003	01 s/d 02	Jam Elektronik	1989	2	25.000,00	50.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.02.04.006	01	Kipas Angin	1997	1	200.000,00	200.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.02.06.037	01	Kaca Hias	1980	1	50.000,00	50.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.05.02.06.037	06 s/d 07	Kaca Hias	1997	2	200.000,00	400.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	1.3.2.05.02.06.037	08 s/d 09	Kaca Hias	1998	2	400.000,00	800.000,00	-	-	BPKAD Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					70	2.662.632,00	13.109.272,00	-	-			
Jumlah 1					160	543.718.641,67	674.705.531,67	661.098.508,67	497.751,00			
2. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI												
a. Barang Intra Kompatabel												



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.2.05.002.001.014	000001	Meja resepsionis	2009	1	9.597.500,00	9.597.500,00	9.597.500,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.003.003.005	000004	Kursi kerja pejabat eselon III	2005	1	1.745.075,00	1.745.075,00	1.745.075,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.002.004.003.	000009	AC window	2004	1	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.05.002.004.003.	000025	AC window	2004	1	5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.05.002.004.004	000002	AC split	2005	1	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.05.002.004.004	000003	AC split	2005	1	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.05.002.004.003	000015	AC window	2009	1	5.465.000,00	5.465.000,00	5.465.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.05.002.004.004	000004	AC split	2005	1	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.002.004.003	000020	AC window	2013	1	4.875.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.002.001.005	000009	Sice	2004	1	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.002.001.005	000001	Sice	1983	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.05.002.006.077	000010	Alat rumah tangga lain-lain	2016	1	70.177.800,00	70.177.800,00	70.177.800,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	1.3.2.05.001.004.002	000002	Lemari kayu/Rak koran	2009	1	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	1.3.2.05.002.004.006	000004	Kipas angin	2002	1	756.000,00	756.000,00	756.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.05.002.007.001	000001	Alat pemadam/portable	2004	1	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.05.002.007.001	000002	Alat pemadam/portable	2004	1	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.05.002.007.001	000003	Alat pemadam/portable	2015	1	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.05.002.007.001	000004	Alat pemadam/portable	2015	1	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.05.002.007.001	000005	Alat pemadam/portable	2015	1	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.06.001.002.042	000001	Rak peralatan	1987	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	1.3.2.06.001.002.042	000002	Rak peralatan	1998	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	1.3.2.05.002.006.007	000012	Loudspeaker	1997	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
23	1.3.2.05.002.006.007	000013	Loudspeaker	1997	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	1.3.5.01.001.007.010	000003	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	2008	1	987.500,00	987.500,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	1.3.5.01.001.007.010	000004	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	2008	1	577.400,00	577.400,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah a					25	142.691.275,00	142.691.275,00	141.126.375,00	0			
b. Barang Ekstra Kompatabel												
1	1.3.2.05.001.004.008	000001	Peti uang/Cash Box/Coin Box	2002	1	375.000,00	375.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
2	1.3.2.05.001.004.008	000002	Peti uang/Cash Box/Coin Box	2002	1	375.000,00	375.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
3	1.3.2.05.001.004.008	000003	Peti uang/Cash Box/Coin Box	2002	1	266.000,00	266.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
4	1.3.2.05.001.004.008	000004	Peti uang/Cash Box/Coin Box	2002	1	418.000,00	418.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
5	1.3.2.05.001.004.002	000002	Lemari kayu	1983	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
6	1.3.2.05.001.004.002	000003	Lemari kayu	1983	1	300.000,00	300.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
7	1.3.2.05.001.004.002	000006	Lemari kayu	1983	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
8	1.3.2.05.002.006.077	000001	Alat rumah tangga lain-lain	1997	1	25.000,00	25.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
9	1.3.2.05.002.006.077	000002	Alat rumah tangga lain-lain	1997	1	25.000,00	25.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
10	1.3.2.05.002.006.077	000003	Alat rumah tangga lain-lain	1997	1	125.000,00	125.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
11	1.3.2.05.002.004.006	000002	Kipas angin	1999	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
12	1.3.2.05.002.004.006	000003	Kipas angin	2002	1	250.000,00	250.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
13	1.3.2.05.002.004.006	000005	Kipas angin	2003	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
14	1.3.2.05.001.005.009	000002	Peta	2003	1	50.000,00	50.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
15	1.3.2.05.002.006.007	000001	Loudspeaker	1985	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
16	1.3.2.05.002.006.007	000002	Loudspeaker	1985	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
17	1.3.2.05.002.006.007	000003	Loudspeaker	1985	2	225.000,00	450.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
18	1.3.2.05.002.006.007	000004	Loudspeaker	1995	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
19	1.3.2.05.002.006.007	000005	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
20	1.3.2.05.002.006.007	000006	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
21	1.3.2.05.002.006.007	000007	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
22	1.3.2.05.002.006.007	000008	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	1.3.2.05.002.006.007	000009	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
24	1.3.2.05.002.006.007	000010	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
25	1.3.2.05.002.006.007	000011	Loudspeaker	1997	1	400.000,00	400.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
26	1.3.5.01.001.004.005	000001	Hukum	2008	1	96.000,00	96.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
27	1.3.5.01.001.001.006	000001s/d 000020	Ensiylopedia, kamus,buku Referensi	2009	20	49.850,00	997.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
28	1.3.5.01.001.007.010	000002	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	2008	1	150.000,00	150.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
29	1.3.5.01.001.007.010	000001	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lainnya	2008	1	189.100,00	189.100,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
30	1.3.5.02.001.001.002	000001	Alat Musik Modern/Band	2003	2	87.500,00	175.000,00	-	-	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali	Rusak Berat	
Jumlah b					51	7.106.450,00	8.366.100,00	-	-			
Jumlah 2					76	149.797.725,00	151.057.375,00	141.126.375,00	0			
Jumlah Total (1 + 2)					236	693.516.366,67	825.762.906,67	802.224.883,67	497.751,00			
						(Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen)	(Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen)	(Delapan Ratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Tujuh Sen)	(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)			

Ditandatangani secara elektronik oleh :

SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Bank BPD Bali
Internet Banking
11/01/2024 10:48:17 / 000006464333

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050250005606
NO REK PDAM	:	20240139024
GOL/RAYON	:	E3-3/05025
NAMA	:	DEKOPIN WILAYAH
BULAN/TAHUN	:	01/2024
PEMAKAIAN(M3)	:	2
JML TAGIHAN	:	Rp 131,000
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2,000
TOTAL BAYAR	:	Rp 133,000

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
11/01/2024 10:48:19 / 000006464373

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	050490018690
NO REK PDAM	:	20240162399
GOL/RAYON	:	D6-4/05049
NAMA	:	DINAS PETERNAKAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2024
PEMAKAIAN(M3)	:	9
JML TAGIHAN	:	Rp 115,325
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2,000
TOTAL BAYAR	:	Rp 117,325

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
11/01/2024 10:48:25 / 000006464421

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	030800003008
NO REK PDAM	:	20240121850
GOL/RAYON	:	D6-4/03080
NAMA	:	DINAS KOPERASI UMKM BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2024
PEMAKAIAN(M3)	:	17
JML TAGIHAN	:	Rp 165,950
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2,000
TOTAL BAYAR	:	Rp 167,950

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
11/01/2024 10:48:26 / 000006464469

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	:	6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	:	080260000152
NO REK PDAM	:	20240150136
GOL/RAYON	:	D6-3/08055
NAMA	:	KEP.KTR.KOPERASI PROP.BALI
BULAN/TAHUN	:	01/2024
PEMAKAIAN(M3)	:	0
JML TAGIHAN	:	Rp 82,900
DENDA	:	Rp 0
ADMIN BANK	:	Rp 2,000
TOTAL BAYAR	:	Rp 84,900

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali
Internet Banking
11/01/2024 10:54:34 / 000006466833

PEMBAYARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA
N.P.W.P : 01.799.721.4.904.000
PPN DIBEBASKAN, PP NO.58 TH 2021

NO KARTU	: 6220240000090529664
NO SAMBUNGAN	: 050220000148
NO REK PDAM	: 20240162260
GOL/RAYON	: D6-4/05049
NAMA	: KTR KETAHANAN PANGAN PROV BALI
BULAN/TAHUN	: 01/2024
PEMAKAIAN(M3)	: 125
JML TAGIHAN	: Rp 1,508,575
DENDA	: Rp 0
ADMIN BANK	: Rp 2,000
TOTAL BAYAR	: Rp 1,510,575

TRANSAKSI BERHASIL

RESI INI
SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
\${footer}

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:18
000006464125

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000688429
NAMA	: PUSAT PEND.KOP.DIREK
TARIF/DAYA	: S2/16500VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00000138-00000708
RP TAG PLN	: Rp 594,000
NO REF	: 01291495B089A2DEA04E71B1145CCF22

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 596,500

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:27
000006464204

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000583053
NAMA	: DEKOPIN WIL PROP
TARIF/DAYA	: B2/6600VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00002510-00000069
RP TAG PLN	: Rp 400,471
NO REF	: 012914C8E6C5D377B04DB791D57BFC78

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 402,971

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:26
000006464212

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551000688819
NAMA	: DNS KETAHANAN PANGAN BALI
TARIF/DAYA	: P1/23000VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00062675-00063720
RP TAG PLN	: Rp 1,777,708
NO REF	: 012914671800FCA9124583A41F681093

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 1,780,208

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:27
000006464220

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551001732803
NAMA	: DNS KETAHANAN PANGAN BALI
TARIF/DAYA	: P1/23000VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00134155-00136429
RP TAG PLN	: Rp 3,864,731
NO REF	: 0129148DBDE721BA844E7B8721DDC6E4

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 3,867,231

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:27
000006464225

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551004047598
NAMA	: DINAS PETERNAKAN
TARIF/DAYA	: P1/33000VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00032942-00033720
RP TAG PLN	: Rp 2,243,380
NO REF	: 0129145BEC3FE6892346D9BCD5EA6DCC

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 2,245,880

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

Bank BPD Bali Internet Banking
11-Jan-2024 / 10:48:06
000006464234

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 551003959410
NAMA	: GEDUNG PLUT KUM PROF BALI
TARIF/DAYA	: P1/66000VA
BL/TH	: Jan24
STAND METER	: 00001569-00001610
RP TAG PLN	: Rp 4,486,759
NO REF	: 012914B5E3906966E047DCA72DD71D35

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Admin Bank : Rp 2,500
Total Bayar : Rp 4,489,259

Terima Kasih
"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB6466131
Tanggal / Jam : 11-Jan-2024 / 10:48:14 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 0361225091
Nama : KEP KTR WIL DIT JEN KOPERASI
Month/Year : Jan24
Biller Reference : 401A
Bill Amount : Rp. 31,857
Biaya Admin : Rp. 2,000
Total Tagihan : Rp. 33,857
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB6464269
Tanggal / Jam : 11-Jan-2024 / 10:48:08 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 0361224557
Nama : KTR WILAYAH KOPERASI PROP BAL
Month/Year : Jan24
Biller Reference : 401A
Bill Amount : Rp. 34,909
Biaya Admin : Rp. 2,000
Total Tagihan : Rp. 36,909
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB6464254
Tanggal / Jam : 11-Jan-2024 / 10:48:11 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 0361729253
Nama : KANTOR KOPERASI USAHA KECIL _
Month/Year : Jan24
Biller Reference : 401A
Bill Amount : Rp. 341,880
Biaya Admin : Rp. 2,000
Total Tagihan : Rp. 343,880
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi	:	IBB6464243
Tanggal / Jam	:	11-Jan-2024 / 10:48:06 WITA
Pembayaran	:	Telkom Bill Payment
Nomor Telepon	:	0361226548
Nama	:	DEKOPIN BALI
Month/Year	:	Jan24
Biller Reference	:	401A
Bill Amount	:	Rp. 248,307
Biaya Admin	:	Rp. 2,000
Total Tagihan	:	Rp. 250,307
Jenis Transaksi	:	Transaksi Sekarang
Status	:	Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB6464193
Tanggal / Jam : 11-Jan-2024 / 10:48:23 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 03614781528
Nama : UPTD. DIKLAT KOPRASI & UMKM
Month/Year : Jan24
Biller Reference : 401A
Bill Amount : Rp. 421,800
Biaya Admin : Rp. 2,000
Total Tagihan : Rp. 423,800
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



Bukti Pembayaran Telkom

Nomor Referensi : IBB6464171
Tanggal / Jam : 11-Jan-2024 / 10:48:20 WITA
Pembayaran : Telkom Bill Payment
Nomor Telepon : 0361237732
Nama : BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN
Month/Year : Jan24
Biller Reference : 401A
Bill Amount : Rp. 31,857
Biaya Admin : Rp. 2,000
Total Tagihan : Rp. 33,857
Jenis Transaksi : Transaksi Sekarang
Status : Sukses

TERIMA KASIH
INTERNET BANKING BPD BALI. ALL RIGHT RESERVED.



பி.சி.கி.கூ.ரூ.பி.கூ.சி. கார்னி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 173 21, Supratman, Denpasar - Bali (80236) TELEPON (0361) 228716
 Website : www.distanpangan.baliprov.go.id Email : distanpangan@baliprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR: B.33.028/13/SEKRET/DISTANPANGAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama | : I Wayan Sunada |
| Jabatan | : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali |
| NIP | : 19671231 198703 1 056 |
| Berkedudukan | : Jl. W.R. Supratman No. 71 Denpasar – Bali |
| | Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA |
| | |
| 2. Nama | : I Wayan Ekadina |
| Jabatan | : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali |
| NIP | : 19701211 199803 1 005 |
| Berkedudukan | : Jl. W.R. Supratman No. 71 Denpasar – Bali |
| | Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA |

Dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan Serah Terima Barang Milik Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan lemari kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai data terlampir.

Pasal 2


Dengan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan keutuhan Barang Milik Daerah yang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, dihapus dari daftar Barang Milik Daerah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dan selanjutnya dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, serta ditetapkan status penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 Yang Menerima,
PIHAK KEDUA,
I WAYAN EKADINA
 NIP. 19701211 199803 1 005


 Yang menyerahkan,
PIHAK PERTAMA,
I WAYAN SUNADA
 NIP. 19671231 198703 1 056


 Mengetahui,
 Sekretaris Daerah
DEWA MADE INDRA
 NIP. 19670203 198602 1 004

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Nomor : B.33.028/13/SEKRE/IDISTANPANGAN

KIB C (GEDUNG BANGUNAN)

No.	Jenis Barang / Nama Barang	No s i o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bangunan Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor					
1	Bangunan Trmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	03.01.01.10.005	000002	Baik	Tidak	Beton	9	Jl. W. R. SUPRATMAN NO. 71	7/12/2017	BAST NO. 027/152/Sekret /DISTPHBUN		Tanah Milik Pemda	Hi/ah	39.500.000,00	Kamar Mandi

No	Kode	Nama Barang	Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor		Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka Mesin					
1	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000007	Almari arsip			1987					Pembelian	150.000,00	
2	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000012	Almari arsip			1996					Pembelian	200.000,00	
3	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000017	Almari arsip			1992					Pembelian	300.000,00	
4	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000020	Almari arsip			2001					Pembelian	300.000,00	
5	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000022	Almari arsip			1985					Pembelian	250.000,00	
6	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000023	Almari arsip			1985					Pembelian	300.000,00	
8	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000024	Almari arsip			1995					Pembelian	300.000,00	
8	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000026	Almari arsip			1995					Pembelian	560.000,00	
9	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000027	Almari arsip			1998					Pembelian		

PIHAK PERTAMA
 DINA KOPERASI KELOMPOK TAWAYAN EKODINA
 NIP. 1970191199803 1 005

Mengelabuh,
 Sekretaris Daerah
DEWA MADE INDRA
 NIP. 19670203 198602 1 004

PIHAK PERTAMA
 Yang menyerahkan,
IWAYAN SUNADA
 NIP. 19871231 198703 1 056



පිහිටි කුරුප්පාටි කුරුප්පාටි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

මහලු කොට්ඨාසයේ කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසාය

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

රාජ්‍ය සේවා කොට්ඨාසයේ කුඩා හා මධ්‍යම ව්‍යවසාය
JL. WR. SUPRATMAN NO. 71 DENPASAR (80236), TELP. (0381) 225091

WEBSITE : www.diskopukm.baliprov.go.id, EMAIL : diskopukm@baliprov.go.id

**BERITA ACARA KOREKSI PENCATATAN GEDUNG
NO. B.25.032/1068/SET/DisKopUKM.**

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga kami telah melakukan koreksi pencatatan gedung dalam aset tetap buku inventaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebesar Rp. 46.592.154 (empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Penatausahaan
Barang.

Ida Bagus Made Suardita, SH.
NIP. 19690705 200901 1 009

Pengurus Barang

Sudarmin, SH.
NIP. 19700817 200701 1 054

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi
Bali.



Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si.
NIP. 19701211 199803 1 005



පරිපාලන මහලය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මහලය පරිපාලන මහලය

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

රාජ්‍ය සේවා මධ්‍යස්ථානය, පුරාණ කලාපය, පලමු මහලය, කොටු මහලය, කොටු මහලය, කොටු මහලය
JL. WR. SUPRATMAN NO. 71 DENPASAR (80236), TELP. (0361) 225091
WEBSITE : www.diskopukm.baliprov.go.id, EMAIL : diskopukm@baliprov.go.id

Bali, 23 November 2022

Nomor : B.25.611.32/2525/Sekret/Diskop UKM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penilaian Bangunan Kantin

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Bali
di -
Tempat

Berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa kantin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Sehubungan hal tersebut mohon bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk bisa melakukan penilaian kembali bangunan kantin di Pusat Layanan Terpadu KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 250 Denpasar Selatan.

Demikian permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I Wayan Ekadina
NIP. 19701211 199803 1 005



Bali
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE